

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENUNDAAN KEHAMILAN DENGAN MEMAKAI ALAT  
KONTRASEPSI PADA PERKAWINAN USIA DINI  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



Oleh

**AMIN WIJAYANTO  
NIM. 11421103773**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**PEKANBARU-RIAU**

**1441 H/2019 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENUNDAAN KEHAMILAN DENGAN MEMAKAI ALAT  
KONTRASEPSI PADA PERKAWINAN USIA DINI  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**S K R I P S I**

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh

**AMIN WIJAYANTO  
NIM. 11421103773**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**PEKANBARU-RIAU**

**1441 H/2019 M**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Drs. Yusran Sabili, MA**

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 20 Desember 2019

No : Nota Dinas

Kepada yth.

Lamp :

Dekan Fakultas Syari'ah dan

Hal : Skripsi Saudara Amin Wijayanto

Hukum UIN Suska Riau

di- Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.*

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberi petunjuk seperlunya serta mengadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara Amin Wijayanto yang berjudul **"PENUNDAAN KEHAMILAN DENGAN MEMAKAI ALAT KONTRASEPSI PADA PERKAWINAN USIA DINI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kepenghuluan Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir)"** telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat ini saudara Amin Wijayanto dipanggil dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Demikian harapan kami, semoga bermanfaat.

*Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.*

Pembimbing

**Drs. Yusran Sabili, M.Ag**

NIP: 196503131992031003



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN


Skripsi dengan judul *PENUNDAAN KEHAMILAN DENGAN MEMAKAI ALAT KONTRASEPSI PADA PERKAWINAN USIA DINI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM*, yang ditulis oleh :

Nama : **AMIN WIJAYANTO**  
NIM : 11421103773  
Program Studi : Hukum Keluarga (AH)  
Telah dimunaqasyahkan pada :  
Hari / Tanggal : Senin 30 Desember 2019  
Waktu : 13:30 Wib  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Lantai 3 Gedung Dekanat  
Fakultas Syariah dan Hukum

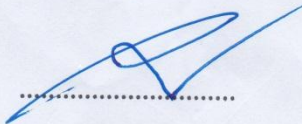
Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 januari 2020 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

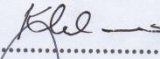
Ketua  
**Rahman Alwi, S.Ag, MA**

  
.....

Sekretaris  
**Peri Pirmansyah, SH, MH**

  
.....

Penguji I  
**Hairul Amri, M.Ag**

  
.....

Penguji II  
**Dr. H. Suhayib, MA**

  
.....

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 19580712 198603 1 005

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penundaan Kehamilan dengan Memakai Alat Kontrasepsi pada Perkawinan Usia Dini dalam Tinjauan Hukum Islam”.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah faktor terjadinya pernikahan dini, dan alasan penundaan kehamilan pada usia dini serta tinjauan hukum Islam terhadap penundaan kehamilan pada usia dini dengan memakai alat kontrasepsi yang terjadi di Kepenghuluan Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para tokoh masyarakat dengan jumlah 4 orang, petugas kesehatan 4 orang dan yang berkaitan langsung dengan kasus 10 orang. Sedangkan yang menjadi sumber data pada penelitian ini ada dua, data primer yakni data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan para tokoh masyarakat dan petugas kesehatan di Kepenghuluan Bangko Mukti, dan masyarakat yang berkaitan langsung dengan kasus ini. Data skunder diambil dari hasil bacaan buku dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam skripsi ini.

Semua data dikumpulkan dan di analisa dengan pendekatan deskriptif dan kualitatif, yaitu menggambarkan fakta yang ditemui dalam penelitian, sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Kemudian mengemukakan kaidah dan pendapat yang bersifat umum kemudian disimpulkan secara khusus, kemudian disusun, dijelaskan dan di analisa untuk diambil kesimpulan.

Hasil yang di capai dari penelitian ini adalah: Faktor utama yang menyebabkan penundaan kehamilan bagi pasangan suami istri usia dini di Kepenghuluan Bangko Mukti, yaitu Faktor keinginan untuk tetap bersekolah dan faktor risiko yang berbahaya terhadap ibu dan anak jika hamil di usia dini dibanding menunda kehamilan di usia dini.

Di zaman kita sekarang ini sudah ada alat-alat kontrasepsi yang dapat dipastikan kemaslahatannya sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, yaitu melindungi anak yang masih menyusui dari bahaya termasuk *me'sadah*/dampak negatif yang lain dengan tidak menggauli istri selama menyusui, tetapi hal ini sangat memberatkan suami.

Atas dasar ini, untuk mewujudkan keluarga berkualitas, maka hukum menunda kehamilan pada perkawinan usia dini adalah mubah/diperbolehkan. Imam Ahmad dan lainnya menetapkan bahwa yang demikian itu diperbolehkan apabila istri mengizinkan. Karena dialah yang lebih berhak terhadap anak dan dia pula yang lebih berhak untuk bersenang-senang. Dan seperti yang diriwayatkan dari Umar ra, bahwa dia melarang 'azl kecuali dengan izin istri.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENUNDAAN KEHAMILAN DENGAN MEMAKAI ALAT KONTRASEPSI PADA PERKAWINAN USIA DINI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM.”** Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'a UIN Suska Riau dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah berkorban harta dan jiwa demi kejayaan Islam sehingga bisa kita rasakan hasil jerih payah beliau.

Sesungguhnya, penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi kami dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu yang telah kami peroleh selama menimba ilmu di bangku perkuliahan sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga masyarakat pada umumnya. Berkenaan dengan itu, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada kedua orang tuaku yang sangat penulis hormati dan cintai, Ayahanda Katijo dan Ibunda terdinta dan tersayang Siti Juwariyah, yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, hingga berjuang dalam menafkahi kebutuhanku. Harapan serta doa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beliaulah hingga saat ini penulis mampu untuk melewati masa-masa sulit selama menjalani studi di bangku perkuliahan. Dan untuk saudaraku terkasih dan tersayang Yunda Nanik Wijayanti beserta Suami, Kang Mas Arya Wijaya, Kang Mas Dakha Warsa Ardianz, serta Keluarga besarku, terima kasih penulis haturkan karena telah membimbing, mencintai, memberi semangat, harapan, arahan, motivasi serta memberi dukungan, baik secara materil maupun spiritual sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Tak lupa pula ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada:

1. Kepada bapak Hajar Hasan, M.Ag selaku dekan fakultas syari'ah dan hukum.
2. Kepada bapak Drs. Yusran Sabili, M.Ag selaku pembimbing skripsi dan bapak Muhammad Ihsan, M.Ag selaku penasihat akademis yang telah memberikan sumbangan pemikiran serta memberi kemudahan dalam segala urusan kepada penulis.
3. Kepada bapak Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku ketua jurusan Hukum Keluarga, terima kasih telah menerima judul yang penulis ajukan. mencari kesamaan judul skripsi.
4. Kepada bapak Ade Faris Fahrullah, MA yang telah membantu dalam menyelesaikan transkrip nilai sementara
5. Seluruh Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Sahabat terbaik Yudi Pratama, Zhafir Elyas, Singgih Nurfadin Maulana, Cuplis Al Sabbaq, Asmadi, Ahmad Shobari, Gunawan, Windi Eka

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prasetya, Mardianto, Aris, Andi, Sevtian, Supriyadi, Purnomo, Ali Usman, Kabul Ngatenan, Rio Rizki Aditya, Irwan Sholeh, Muhammad Basri, Muhammad Al-baqi, Muhammad Jefri, Saiful Abdullah dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas do'a dan dukungannya.

7. Sahabat-sahabat seperjuangan AH3, AH1, AH2, dan teman-teman seangkatan kuliah tahun 2014 yang selama ini selalu memberikan dukungan dan motivasi.

8. Untuk bapak Karno selaku Penghulu di Kepenghuluan Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir-Riau, terimakasih telah memberikan masukan dan arahan serta telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah tepat pada waktunya.

9. Untuk para tokoh masyarakat dan petugas kesehatan Kepenghuluan Bangko Mukti yang telah berupaya meluangkan waktunya, membantu memberikan informasi serta dokumen sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Demikian skripsi ini penulis selesaikan sebaik mungkin, namun penulis menyadari bahwa penulis adalah seorang manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan baik karena disengaja maupun tidak sengaja, maka dari itu dengan segala kerendahan hati kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah di masa akan datang.



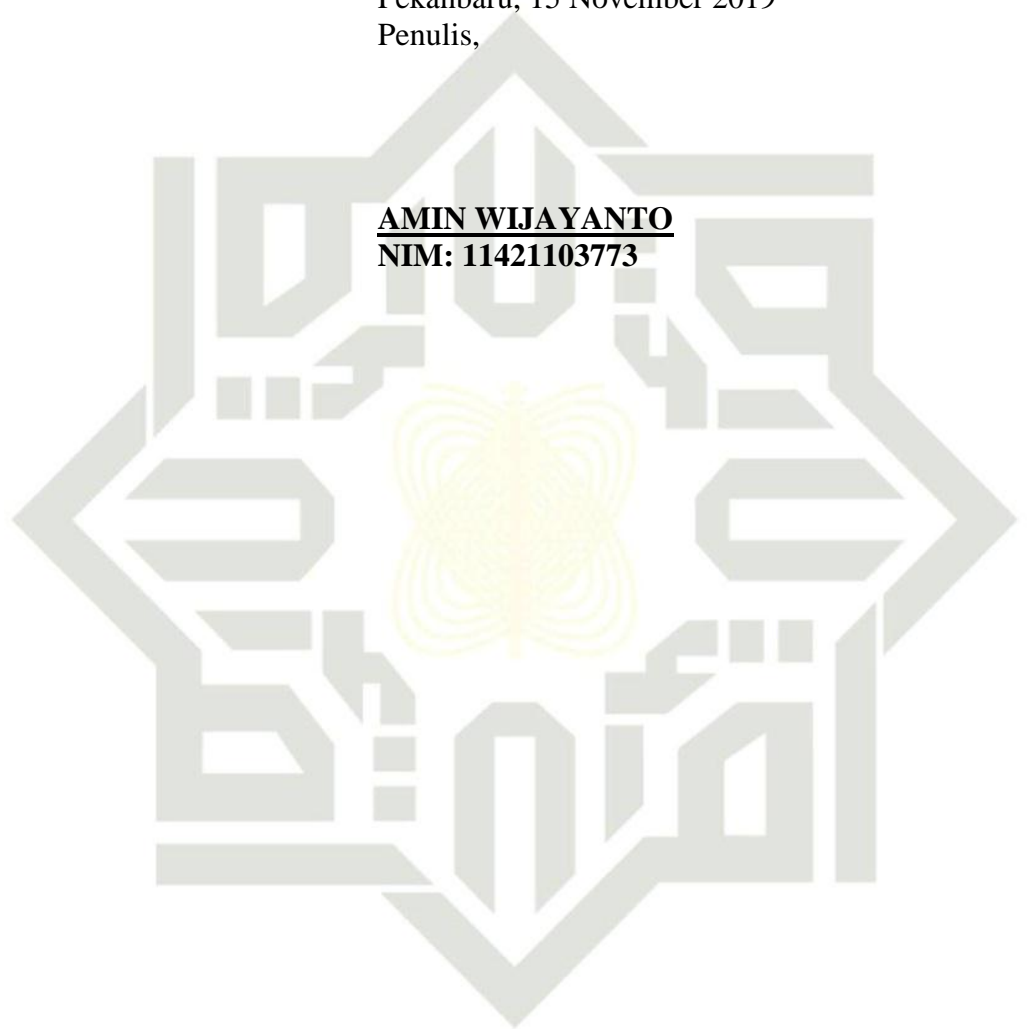
**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan hanya kepada Allah penulis memohon ampunan atas semua kesalahan, semoga skripsi ini dapat berguna, Aamiin....

Pekanbaru, 15 November 2019  
Penulis,

**AMIN WIJAYANTO**  
**NIM: 11421103773**



UIN SUSKA RIAU

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Pembatasan Masalah .....	10
C.    Rumusan Masalah .....	10
D.    Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E.    Metode Penelitian.....	12
F.    Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II     GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A.    Sejarah Kepenghuluan Bangko Mukti .....	17
B.    Demografi Kepenghuluan Bangko Mukti .....	19
C.    Keadaan Sosial .....	20
D.    Keadaan Ekonomi .....	23
E.    Keadaan Agama .....	23
<b>BAB III    KAJIAN TEORI</b>	
A.    Pernikahan Menurut Hukum Islam .....	24
B.    Prinsip Pernikahan yang Tertuang dalam Undang-undang Perkawinan .....	34
C.    Hikmah dan Tujuan Pernikahan.....	39
D.    Pernikahan Dini dan Kehamilan di Usia Dini .....	43
E.    Penundaan Kehamilan .....	49
F.    Kaidah <i>Jalbu al-Mashalih wa Daf'u al-Mafasid</i> .....	56



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan Usia Dini dan Penundaan Kehamilan dengan Memakai Alat Kontrasepsi .....	64
B. Alasan Penundaan Kehamilan dengan Memakai Alat Kontrasepsi pada Perkawinan Usia Dini .....	68
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Pada Perkawinan Usia Dini .....	73

## BAB V

### PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

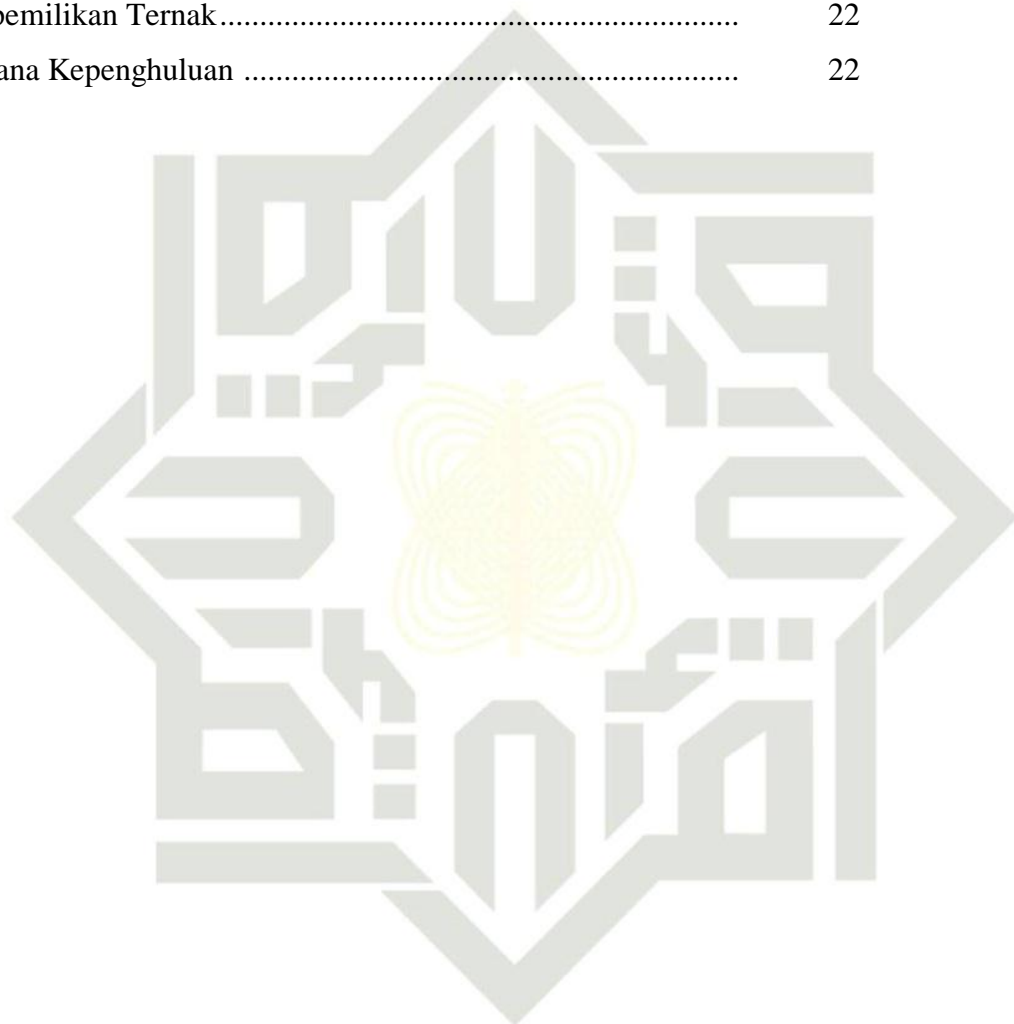
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk .....	20
Tabel 2	Tingkat Pendidikan .....	21
Tabel 3	Mata Pencaharian .....	21
Tabel 4	Kepemilikan Ternak .....	22
Tabel 5	Sarana Kepenghuluan .....	22



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Melakukan Riset Dekan
Lampiran 2	Surat Izin Melakukan Riset Gubernur Riau
Lampiran 3	Surat Izin Melakukan Riset Kesbangpol Kabupaten Rokan Hilir
Lampiran 4	Surat Izin Melakukan Riset Kecamatan Bangko Pusako
Lampiran 5	Surat Izin Melakukan Riset Kepenghuluan Bangko Mukti
Lampiran 7	Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Riset Kepenghulan Bangko Mukti
Lampiran 8	Surat Persetujuan Pembimbing
Lampiran 9	Surat Pengesahan Perbaikan Ujian Proposal
Lampiran 10	Surat Keterangan Telah Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 11	Kegiatan Bimbingan Dan Skripsi

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga bahagia, harmonis, sejahtera, unggul, dan berkualitas yang turut berkontribusi dalam mewujudkan program pembangunan keluarga nasional seutuhnya. Namun temuan empirik menunjukkan, masih terdapat institusi keluarga yang belum mengoptimalkan tujuan perkawinan. Hal itu disebabkan oleh faktor ketidaksiapan usia perkawinan baik dari aspek fisik, psikis, maupun spiritual.<sup>1</sup>

Ketika kalimat akad telah diucapkan oleh seorang calon suami di dalam perkawinan, maka saat itu terdapat hak dan kewajiban masing-masing mempelai akan berlangsungnya perkawinan setelah akad di ucapkan oleh seorang laki-laki. Hak dan kewajiban tersebut benar-benar memperhatikan kondisi hubungan rumah tangga, di mana rumah tangga yang menjadi dambaan dan harapan bagi setiap Insan sebagaimana terdapat di dalam UU No.1 Tahun 1974 untuk memenuhi kebahagiaan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri bukan hanya dilihat dari satu sisi mengenai ketenteraman hidup di lihat dari agama atau kepercayaan masing-masing mempelai, tetapi juga hak dan kewajiban antara suami dan istri harus

---

<sup>1</sup> Muhamad Dani Somantri, "Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas: Analisa, Hukum, Perkawinan, Istihsan, dan Keluarga". *Mahkamah*. Vol. 3, No.2, Desember 2018, PDF File, h. 203.



terikat oleh salah satu ketentuan yang dibuat oleh pemerintah guna mewujudkan kehidupan tertib dan damai baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.<sup>2</sup>

Menurut konsep Al-Quran Surat Ar Rum (30) : 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Tujuan ditasbihkannya syariat perkawinan kepada umat manusia adalah untuk memperoleh ketenangan (sakinah)<sup>3</sup>, rasa cinta (mawadah)<sup>4</sup>, kasih sayang (rahmah)<sup>5</sup>, serta mampu membentuk institusi keluarga yang ideal seperti yang dijelaskan Allah dalam surat Al-Baqarah (02) : 187,

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرِبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian

<sup>2</sup> Ibid., h. 204.

<sup>3</sup> Dalam al-Quran kata sakinah berikut bentuk derivasinya ditulis sebanyak 69 kali yang artinya “menunjukkan makna rasa ketenteraman, ketenangan jasmani dan rohani”. Raghīb al-Ashfahani, *al-Mufradat fi Ghriibi al-Quran*, (Beirut: Maktabah Nazar Musthafa, t. th), jilid 1, h. 236.

<sup>4</sup> Dalam al-Quran kata mawadah berikut bentuk derivasinya tercatat sebanyak 25 kali yang berarti “mencintai sesuatu dan berharap agar bisa terlaksana”. Raghīb al-Ashfahani, *al-Mufradat fi.....*, h. 615.

<sup>5</sup> Dalam al-Quran kata rahmah berikut bentuk derivasinya terinci sebanyak 399 kali, artinya “sifat yang mendorong manusia untuk melakukan kebaikan secara suka rela”. Raghīb al-Ashfahani, *al-Mufradat fi.....*, h. 191.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

Selanjutnya untuk dapat mewujudkan tujuan pernikahan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan pernikahan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan.<sup>6</sup>

Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”.<sup>7</sup>

Aturan ini juga terdapat dalam Bab IV pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa :

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-

<sup>6</sup> Ririn Angreany, Skripsi: *"Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa"* (Makassar: UIN Alauddin, 2016), h. 2.

<sup>7</sup> Data\_elektronis\_sumber\_hukum\_RGS\_&\_Mitra Dihimpun dari cyber-space [internet] Indonesia diedit ulang oleh, Kantor Pengacara-Konsultan Hukum RGS & Mitra, *"UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"*. PDF File, h. 2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang kurangnya berumur 16 tahun.

- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.<sup>8</sup>

Dengan adanya batasan umur ini pada dasarnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menghendaki pelaksanaan pernikahan di bawah umur. Penulis menilai nikah di bawah umur yang di maksud jika di kaitkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 adalah bukan karena belum baligh atau belum mencapai umur dewasa seperti dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Bab II pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa : Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.<sup>9</sup>

Tetapi makna di bawah umur lebih cenderung pada batasan yang ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Bab II pasal 7 ayat (1) di atas.

Tujuan kemaslahatan pembatasan umur minimal untuk melakukan nikah bagi warga negara dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan dalam berpikir, kematangan jiwa dan

<sup>8</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung : Nuansa Aulia), h. 5.

<sup>9</sup> Data\_elektronis\_sumber\_hukum\_RGS\_&\_Mitra Dihimpun dari cyber-space [internet] Indonesia diedit ulang oleh, Kantor Pengacara-Konsultan Hukum RGS & Mitra, *loc.cit*.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuatan fisik yang memadai. Selain itu yang harus dihindari adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, hal ini agar tujuan pernikahan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin dapat terwujud.<sup>10</sup>

Melahirkan merupakan suatu peristiwa yang wajar bagi perempuan bila sudah menikah. Secara biologis, wanita sudah bisa hamil setelah mendapat menstruasi pertama, artinya seorang wanita sudah dapat mempunyai anak sebelum berusia 20 tahun. Namun, pada usia tersebut sesungguhnya wanita belum siap untuk mempunyai anak. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia yang ideal untuk hamil adalah 20-30 tahun, jika lebih atau kurang dari usia tersebut adalah berisiko.<sup>11</sup>

Apabila ditelusuri akar permasalahan tingginya tingkat risiko kematian ibu (AKI/*mother mortality rate*) dan bayi (ABI/*infrant mortality rate*) yang terindikasi dari kondisi jiwa ibu hamil dan janin terganggu, bayi prematur atau cacat, pendarahan yang hebat ketika melahirkan, berat bayi lahir rendah (BBLR), ketidaksiapan mental mengubah peran menjadi sosok orang tua, serta problematika lainnya merupakan dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini yang pasca akad nikah langsung mengalami kehamilan pada paruh tahun pertama dari perkawinan, mereka tidak menunda kekosongan rahim dari pembuahan sperma sampai tibanya masa kematangan

<sup>10</sup> Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Cet.3; Bandung: Prenada Media Group, 2006), h.74.

<sup>11</sup> BKKBN. *Pendewasaan Usia Kawin dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, (Jakarta: BKKBN, 2008), h. 21.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara jasmani, rohani, dan jiwa. Diagram stratifikasi data penyebab kematian perempuan Indonesia paling tinggi disumbangkan oleh faktor terlalu muda dalam kehamilan. Hal ini berkaitan antara usia perempuan saat perkawinan pertama dengan faktor risiko melahirkan. Semakin muda usia perkawinan pertama semakin besar risiko yang dihadapi bagi keselamatan kesehatan ibu maupun bayi, secara mental perempuan muda yang cepat menikah umumnya sangat rentan perceraian karena faktor emosi yang belum stabil, belum memiliki kesiapan berumah tangga, serta belum siap menerima pengetahuan tentang kehamilan dan persalinan.<sup>12</sup>

Menurut skripsi yang ditulis oleh Dasri dengan judul PENUNDAAN KEHAMILAN DENGAN MEMAKAI ALAT KONTRASEPSI BAGI PENGANTIN BARU DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu) yang kemudian menjadi salah satu referensi penulis menyatakan bahwa perencanaan kelahiran sebenarnya sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Namun untuk masa sekarang, perencanaan kelahiran sudah didukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih sehingga upaya pencegahan kelahiran lebih mudah dikendalikan. Dalam upaya tersebut dapat dilakukan berbagai cara, yang salah satunya dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi.<sup>13</sup>

Dalam ajaran agama Islam, konsep menunda atau mencegah kehamilan (man'u al-hamli) bukanlah sesuatu yang baru, sebab usaha

<sup>12</sup> BPS Susenas, *Profil Anak Indonesia 2015*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP &PA), 2015), PDF File, h. 24.

<sup>13</sup> Dasri, " *Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Bagi Pengantin Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam*". *Qiyas. Vol. 1, No.1, April 2016*, PDF File, h. 107.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunda kehamilan pernah dipraktikkan oleh para sahabat semenjak zaman Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan istilah al-'azl.<sup>14</sup> Sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari dari Jabbar:<sup>15</sup>

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعَزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعَزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ وَعَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعَزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij dari Atha' dari Jabir ia berkata; "Pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kami pernah melakukan 'Azl (mencabut penis saat ejakulasi)." Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan Telah berkata Amru Telah mengabarkan kepadaku Atha' Ia mendengar Jabir radhiyallahu 'anhu berkata; Kami melakukan 'Azl, sedangkan Al Qur'an juga turun. Dan dari Amru dari Atha' dari Jabir ia berkata; Kami melakukan 'Azl di masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Al Qur'an juga turun." (HR. Bukhari).<sup>16</sup>

Secara etimologi al-'azl berasal dari kata a'zala-ya'zilu-a'zlan, artinya memisahkan atau menyingkirkan.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut terminologi, al-'azl didefinisikan sebagai suatu usaha membuang sel sperma di luar rahim ketika merasakan pemancarannya.<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaili menyederhanakan makna al-'azl dengan usaha mengeluarkan sperma di luar vagina. Dengan demikian al-'azl upaya suami untuk melepaskan air sperma di luar rahim istrinya agar tidak

<sup>14</sup> Muhamad Dani Somantri, *Op.Cit.*, h.208.

<sup>15</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul al-Athar*, (Beirut: Darl Fikr, t.t), h. 320.

<sup>16</sup> Teks Hadits Dalam Lidwa Pusaka i-Software. Kitab 9 Imam Hadits. "HR Bukhari Versi Al-Alamiyah, Kitab Nikah Bab Azl" Nomor. 4808.

<sup>17</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. Ke-2, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 927.

<sup>18</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terjemahan oleh Ahmad Semait, (Jakarta: Pustaka Nasional, 2010), h. 323.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi pembuahan/konsepsi yang akan berakibat tertundanya masa kehamilan. Aplikasi penerapan al-'azl dilakukan ketika terjadi hubungan seks. Suami menyengaja menumpahkan sel sperma di luar vagina istri sesaat sebelum suami mengalami ejakulasi (pengeluaran air mani) yang mengakibatkan tertundanya proses penyatuan sel sperma atau konsepsi.<sup>19</sup>

Perkawinan hakikatnya adalah bertemunya dua makhluk lawan jenis yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang sejalan, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawwadah, dan rahmah. Seiring dengan hal tersebut, maka dapat diartikan juga bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi serta tidak putus begitu saja. Karena pada dasarnya bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang kuat (mitsaqan ghalidzan). Hal ini adalah wajar mengingat perkawinan mempunyai makna yang bermuatan komprehensif, yaitu sosial kemasyarakatan, individu, dan agama. Setiap manusia pasti mencita-citakan agar perkawinannya dapat berlangsung kekal abadi selamanya, dan tidak menghendaki terputus di tengah jalan. Tapi adakalanya, suatu perkawinan oleh sebab-sebab tertentu dapat mengakibatkan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya. Sebab-sebab tersebut sangatlah banyak sepanjang sejarah kehidupan manusia.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-iila' Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*, alih bahasa oleh, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) jilid ke-9, h. 104.

<sup>20</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 128.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan realita data di atas, terdapat kesenjangan antara kedudukan dan fungsi perkawinan yang seharusnya memberikan kemaslahatan hidup berkeluarga (*dasein*) dengan keadaan empirik di lapangan (*dasollen*). Padahal syariat Islam memandang bahwa perkawinan merupakan sarana ibadah yang melahirkan ketenangan hidup, rasa cinta, dan kasih sayang berkeluarga yang pada tahap selanjutnya akan mendapatkan keturunan (*hifdzu al-nasl*). Demikian juga Undang-undang menempatkan perkawinan sebagai langkah awal (*starting point*) menciptakan keluarga yang sejahtera, maju, mandiri, harmonis, bahagia lahir batin, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>21</sup>

Hemat peneliti, di antara faktor penyebab yang dianggap krusial menimbulkan permasalahan internal keluarga di Indonesia adalah tradisi pasangan perkawinan usia dini dan dalam hal ini telah terjadi pula di lingkungan masyarakat Kepenghuluan Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir yang menurut sumber dari Sekretaris Kepenghuluan, dari 597 KK terdapat sekitar 27 pasangan suami istri berusia dini yang menunda kehamilannya<sup>22</sup> dan berdasarkan data yang penulis dapat dari tiga (3) Bidan mengungkapkan:

“Masih banyak pengantin baru usia dini yang ada di Kepenghuluan Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir menunda kehamilannya dengan memakai alat kontrasepsi seperti suntik KB dan pil”.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Muhamad Dani Somantri, *Op. Cit.*, h. 207.

<sup>22</sup> Salamun, *Wawancara*, Kepenghuluan Bangko Mukti, tanggal 11 Juli 2018.

<sup>23</sup> Melli, Ros, Azri Riyanti, dan Kodri, *Wawancara*, Kepenghuluan Bangko Mukti, tanggal 13 Juli 2018.

Oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih jauh dalam bentuk skripsi dengan judul : PENUNDAAN KEHAMILAN DENGAN MEMAKAI ALAT KONTRASEPSI PADA PERKAWINAN USIA DINI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM.

## **B. Pembatasan Masalah**

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yakni dengan memfokuskan kepada tinjauan hukum Islam lebih baik hamil pada usia muda atau menunda kehamilan pada usia muda dengan memakai alat kontrasepsi.

## **C. Rumusan Masalah**

Sehubung dengan latar belakang masalah dan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa saja alasan yang mempengaruhi penundaan kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi di Kepenghuluan Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan penundaan kehamilan pada perkawinan usia dini?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah :

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui alasan yang mempengaruhi penundaan kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi di Kepenghuluan Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam tentang hamil pada usia dini dan penggunaan alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan pada perkawinan usia dini.

**2. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Yang paling utama adalah bermanfaat bagi penulis dan sebagai pelengkap tugas serta syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska.
- b. Sebagai salah satu sumbangsih pemikiran yang bermanfaat untuk ke depan, meskipun tidak begitu sempurna dan perlu perbaikan dalam berbagai hal.
- c. Dan diharapkan bisa dijadikan untuk bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi peneliti selanjutnya serta dapat menambah wacana dan wawasan para mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang berdasarkan pada data dari masyarakat di lokasi yang diteliti, yang penulis lakukan di Kepenghuluan Bangko Mukti kecamatan Bangko Pusako kabupaten Rokan Hilir, yakni terhadap penundaan kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi pada perkawinan usia dini yang menurut penulis layak untuk diteliti dan ditinjau berdasarkan hukum Islam.

Adapun alasan penulis memilih lokasi ini adalah kasus ini banyak terjadi di lokasi tersebut sehingga penulis tertarik untuk mengkajinya berdasarkan hukum Islam dan dapat terjangkau serta memudahkan bagi penulis dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini karena penulis juga berdomisili di wilayah tersebut.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

- a. Subjek penelitian ini adalah pasangan suami istri berusia dini, petugas kesehatan serta tokoh masyarakat di Kepenghuluan Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Objek penelitian ini adalah penundaan kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi pada perkawinan usia dini dalam tinjauan hukum Islam di Kepenghuluan bangko mukti kecamatan bangko pusako kabupaten rokan hilir.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **3. Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini yaitu informan yang mengetahui informasi tentang objek penelitian. Informan yang penulis tentukan merupakan orang-orang yang terkait secara langsung dalam masalah penundaan kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi pada perkawinan usia dini di Kepenghuluan Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir yaitu 10 pasangan suami istri usia dini, dan informan yang tidak terkait secara langsung 4 petugas kesehatan dan 4 tokoh masyarakat setempat.

### **4. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Yakni data yang diperoleh dari pasangan suami istri usia dini, petugas kesehatan dan tokoh masyarakat yang akan penulis wawancarai untuk penelitian lapangan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diambil dari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Observasi, yaitu mengidentifikasi langsung di lokasi penelitian terhadap pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan pada usia dini dan menunda kehamilannya dengan memakai alat kontrasepsi , khususnya alasan mereka melakukan hal itu.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden tentang masalah yang diteliti.
- c. Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang berupa tulisan, gambar atau karya monumental, dokumentasi merupakan pendukung dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara agar penelitian yang lakukan lebih kredibel dan dapat dipercaya.
- d. Studi kepustakaan, yaitu menelaah buku-buku yang ada hubungannya dengan Hukum penundaan kehamilan dan dampak terhadap kesehatan dalam penggunaan alat kontrasepsi pada usia dini.

#### 6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mengelompokkan data yang terkumpul melalui observasi dan wawancara sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Kemudian antara satu data dengan data yang lainnya dihubungkan, serta di analisa melalui pendekatan teori serta pendapat para ahli mengenai hukum

penundaan kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi pada perkawinan usia dini.

## 7. Metode Penulisan

Adapun metode penulisan yang digunakan adalah :

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan fakta yang ditemui dalam penelitian, sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yakni faktor-faktor terjadinya pernikahan dini, faktor yang mempengaruhi penundaan kehamilan pada perkawinan usia dini, dampak positif negatif, dan sebagainya.
- b. Kualitatif, yaitu memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

## Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, penulis menyusunnya secara sistematika dalam lima bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Gambaran Lokasi Penelitian, yang meliputi Kondisi Umum Kepenghuluan Bangko Mukti. Sosial Ekonomi dan Demografi, Sosial Budaya Masyarakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab III : Kajian Teori, yang meliputi Tinjauan Umum pernikahan dan Hukum Islam tentang Pernikahan, meliputi tentang Pengertian Pernikahan, Dasar Hukum, Syarat dan Rukun, Prinsip dan Tujuan Pernikahan. Serta Tinjauan Umum dan Hukum Islam tentang Pernikahan Dini, Hamil pada Usia Dini dan Menunda Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Pada Perkawinan Usia Dini yang meliputi tentang Pengertian Pernikahan Dini, Pernikahan Dini menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pernikahan Dini dalam perspektif hukum Islam, Pengertian Kehamilan di Usia Dini, Pengertian Penundaan Kehamilan, Hukum Penundaan Kehamilan dalam Islam, Metode Penundaan Kehamilan. Penjelasan Kaidah *Jalbu al-Mashalih wa Daf'u al-Mafasid* meliputi tentang Pengertian dan Penerapan *Jalbu al-Mashalih wa Daf'u al-Mafasid*.

Bab IV : Hasil Penelitian, bab ini berisikan tentang berbagai alasan yang mempengaruhi penundaan kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi di Kepenghuluan Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Tinjauan hukum Islam serta analisis tentang hamil pada usia dini dan penggunaan alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan pada perkawinan usia dini.

Bab V : Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KEPENGHULUAN BANGKO**

#### **MUKTI KECAMATAN BANGKO PUSAKO**

#### **KABUPATEN ROKAN HILIR**

##### **A. Sejarah Kepenghuluan Bangko Mukti**

Pada awal mulanya Kepenghuluan Bangko Mukti adalah sebuah Dusun dari eks-transmigrasi Kepenghuluan Karya Mukti Rokan II Unit I yang pada saat itu berada di Kecamatan Bangko Kabupaten Bengkalis, sebelumnya masih berupa hutan belantara sebagai tempat penduduk pribumi mengambil kayu balak, rotan, dan ikan sebagai penghasilannya pada masa itu. Dengan adanya program pemerintah pada masa orde baru yang melakukan penyebaran penduduk melalui perpindahan penduduk dari daerah atau pulau yang padat penduduknya ke daerah yang masih kurang padat penduduknya atau yang lebih dikenal dengan program Transmigrasi, maka oleh pemerintah sebagian penduduk dari Pulau Jawa dipindahkan, salah satunya ke Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Bangko (saat itu) yaitu Rokan II Unit I Tahun penempatan Februari 1981 dengan jumlah Kepala Keluarga 201, dengan pola transmigrasi umum dengan sistem pertanian palawija (1 KK mendapat pemberian lahan 2 Ha (0,25 Ha lahan perumahan, 1 Ha lahan usaha I, dan 0,75 lahan usaha II / tambahan).

Dengan adanya program transmigrasi tersebut, Kabupaten Bengkalis mulai nampak pesat pembangunannya terutama Kepenghuluan-Kepenghuluan yang berdekatan dengan pemukiman transmigrasi, terlebih lagi dengan jumlah penduduknya, dengan demikian kabupaten Bengkalis dimekarkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi Kabupaten Rokan Hilir, dan kecamatan Bangko pun dimekarkan menjadi beberapa Kecamatan, di antaranya Kecamatan Rimba Melintang yang menjadi induk dari Kepenghuluan Karya Mukti (Saat itu). Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan pesatnya pembangunan, maka pada tahun 1999 terbentuklah Kecamatan Bangko Pusako yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rimba Melintang.

Menimbang Dusun Bangko Mukti lebih dekat dengan wilayah Pemerintahan kecamatan Bangko Pusako dari pada wilayah pemerintahan Kecamatan Rimba Melintang, bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan Kepada masyarakat Dusun Bangko Mukti secara berdaya guna dan berhasil guna serta memperpendek dan mempermudah urusan pada pusat pemerintahan kecamatan, perlu dilakukan penetapan perubahan status wilayah administratif Dusun Bangko Mukti, sehubungan dengan maksud tujuan hal di atas, maka ditetapkanlah oleh Bupati Rokan Hilir dengan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir, NOMOR: 33 TAHUN 2008 ,pada tanggal 19 Agustus 2008 Dusun Bangko Mukti dimekarkan menjadi Kepenghuluan Bangko Mukti Saat ini Kepenghuluan Bangko Mukti berpenduduk 589 KK dengan jumlah jiwa 2116. Yang terbagi dengan 2 (dua) Dusun, 6 (enam) RW, dan 16 (enam belas) RT.

Sekarang ini, Kepenghuluan Bangko Mukti merupakan salah satu Kepenghuluan dari 14 Kepenghuluan yang berada di Kecamatan Bangko Pusako.

## Demografi Kepenghuluan Bangko Mukti

### a. Kondisi Umum

Kepenghuluan Bangko Mukti merupakan Kepenghuluan eks-transmigrasi dan salah satu Kepenghuluan dari 14 Kepenghuluan yang ada di Kecamatan Bangko Pusako dengan jumlah penduduk berdasarkan sensus tahun 2018 sebanyak 589 KK terdiri dari 2.116 jiwa.

### b. Iklim

Iklim Kepenghuluan Bangko Mukti, sebagaimana Kepenghuluan lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim tropis, musim kemarau ataupun musim hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam masyarakat maupun kesuburan tanah.

### c. Letak dan Luas Wilayah

Kepenghuluan Bangko Mukti terletak di dataran rendah yang berjarak  $\pm 1$  KM ke arah Selatan dari kota kecamatan, mempunyai luas wilayah  $\pm 7,1$  Km<sup>2</sup>.

Batas Wilayah

Letak geografi Kepenghuluan Bangko Mukti terletak di antara :

Sebelah utara : Kepenghuluan Bangko Kanan / Sungai Bangko

Sebelah selatan : Kepenghuluan Karya Mukti

Sebelah barat : Kepenghuluan Bangko Makmur

Sebelah timur : Kepenghuluan Bangko Kiri

Seperti gambar denah di bawah ini:



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Gambar Denah Wilayah Kepenghuluan Bangko Mukti



### C. Keadaan Sosial

#### a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2018, Kepenghuluan Bangko Mukti mempunyai jumlah penduduk 2.116 Jiwa, yang tersebar di 2 dusun (Dusun Maju Mukti dan Dusun Sido Dadi) dan 6 RW, serta 16 RT dengan perincian seperti tabel dibawah ini :

**Tabel 1 : Jumlah Penduduk**

No	Uraian	Dusun		Jumlah
		Maju Mukti	Sido Dadi	
1	Jiwa	1.211	995	2.206
2	KK	318	279	597

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan masyarakat Kepenghuluan Bangko Mukti cukup beragam, mulai dari tidak tamat SD, umumnya pada masyarakat generasi tua, sampai Kepada sarjana, baik diploma 1,2,3 atau strata 1 bahkan strata 2, dan masih banyak yang pada saat ini menimba ilmu di bangku kuliah, secara umum dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

**Tabel 2 : Tingkat Pendidikan**

<i>Pra Sekolah</i>	<i>SD</i>	<i>SMP</i>	<i>SMA</i>	<i>D1/D3</i>	<i>S I</i>
88	900	729	413	51	25

**c. Mata Pencaharian**

Karena Kepenghuluan Bangko Mukti merupakan Kepenghuluan pola perkebunan, maka dengan sendirinya sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai petani, hal ini selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3 : Mata Pencaharian**

<i>Petani</i>	<i>Pedagang</i>	<i>PNS</i>	<i>Buruh</i>	<i>DII</i>
599	25	15	95	

**d. Pola Penggunaan Tanah**

Penggunaan tanah di Kepenghuluan Bangko Mukti sebagian besar diperuntukkan untuk lahan perkebunan, sedangkan sisanya untuk lahan pekarangan yang merupakan bangunan perumahan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**e. Kepemilikan Ternak**

Jumlah kepemilikan ternak oleh penduduk Kep Bangko Mukti dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4 : Kepemilikan Ternak**

<i>Ayam</i>	<i>Kambing</i>	<i>Sapi</i>	<i>Kerbau</i>	<i>dll</i>
1.214	20	10	-	-

**f. Sarana Kepenghuluan**

Kondisi sarana dan prasarana umum yang ada di Kepenghuluan Bangko Mukti secara garis besar adalah sebagai berikut:

**Tabel-5 : Sarana Kepenghuluan**

NO	Sarana Kepenghuluan	Jumlah
1	Kantor Penghulu	1
2	Masjid dan Musholla	3 dan 1
3	Sekolah	2 (SD dan TK)
4	Jalan Kabupaten	1
5	Jalan Kecamatan	1
6	Jalan Kepenghuluan	7
7	Lapangan bola kaki dan bola volly	1



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau D. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Kepenghuluan Bangko Mukti yang pada awal transmigrasi dulu hampir sama kondisinya, namun dengan perjalanan waktu hal itu juga mulai tampak ada perbedaan-perbedaan, secara kasat mata dapat dilihat bahwa kehidupan rumah tangga penduduk sekarang ini ada yang dikategorikan masih tetap miskin, sedang, dan kaya. Hal ini disebabkan karena banyak hal, antara lain mata pencaharian tambahan di sektor-sektor usaha lain, sebagian besar di sektor nonformal seperti pedagang, buruh upahan, pertukangan, petani ikan, dan di sektor formal seperti PNS, honorer, dll, sebab lain adalah pola pikir masyarakat, budaya, perilaku, dll.

## E. Keadaan Agama

Dalam masalah agama Seluruh masyarakat Kepenghuluan Bangko Mukti beragama Islam dengan mayoritas beradatkan Jawa. Kerukunan dan gotong royong sangat di junjung tinggi di Kepenghuluan Bangko Mukti ini. Hal ini terlihat saat ada acara keagamaan maupun adat.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Keseluruhan data di ambil dari data offline kantor Kepenghuluan Bangko Mukti, *Profil Kepenghuluan Bangko Mukti Tahun 2018*, yang disesuaikan dengan buku *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan (RPJM) Kepenghuluan Bangko Mukti Tahun 2018-2022*. Yang diambil pada tanggal 03 September 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III KAJIAN TEORI

### A. Pernikahan Menurut Hukum Islam

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan sertanya.<sup>25</sup>

#### 1. Pengertian Nikah

Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.<sup>26</sup>

Sejalan dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili di atas, Syekh Hasan Ayyub dalam bukunya Fikih Keluarga, mendefinisikan, nikah menurut bahasa adalah berarti penggabungan dan pencampuran, sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>27</sup>

Lebih lanjut Sulaiman Rasjid dalam bukunya Fiqh Islam mengartikan nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan

<sup>25</sup> Abdur Rahman I, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, alih bahasa oleh Basri Iba Asghary dan Wadi masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) h. 1.

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 39.

<sup>27</sup> Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar. (Jakaarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>28</sup>

Memed Humaedillah dalam bukunya Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya, mengartikan perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan kata *menikahkan* atau *mengawinkan*, yang dengan akad itu menjadi halal suatu persetubuhan dan mengikat pihak yang diakadkan menjadi suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.<sup>29</sup>

Syekh Kamil Muhammad Uwaidah dalam bukunya Fiqih Wanita Edisi Lengkap, mengartikan nikah sebagai akad, atau berhubungan badan.<sup>30</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) untuk menaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>31</sup>

Dari beberapa pengertian di atas penulis melihat ada beberapa unsur yang mengikat setelah pernikahan dilaksanakan yaitu:

- a. Nikah adalah akad yang sah dan sangat kuat yang memiliki nilai ibadah.

<sup>28</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006) Cet ke-39, h. 374.

<sup>29</sup> Memed Humaedillah, *Setatus Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema insani, 2002), h. 3.

<sup>30</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, alih bahasa oleh Abdul Ghoffar, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), Cet. Ke-1, h. 396.

<sup>31</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Akamedia Pressindo, 1992), h.114.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Nikah adalah akad yang menghalalkan segala pergaulan yang baik dan mengharamkan segala pergaulan yang tidak baik antara suami dan istri.
- c. Nikah adalah akad yang membatasi hak dan kewajiban antara suami istri.

Penulis menyimpulkan tentang pengertian nikah adalah akad yang sah dan sangat kuat yang memiliki nilai ibadah, menghalalkan segala bentuk pergaulan yang baik dan melarang segala bentuk pergaulan yang tidak baik antara suami dan istri, serta membatasi segala hak dan kewajiban antara suami dan istri.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga diperintahkan Nabi. Banyak perintah-perintah Allah SWT di dalam Al-Quran untuk melaksanakan perkawinan. Di antara Firmannya adalah dalam QS. An-Nur (24) : 32:<sup>32</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya)Lagi Maha mengetahui”.

Begitu pula perintah Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Di antaranya seperti dalam hadits Nabi dari Anas bin Malik

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban sabda Nabi yang bunyinya:<sup>33</sup>

تزوجوا الودود الولود فاني مكاثركم بالامم يوم القيامة

“Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat”.

Nabi SAW. Juga memerintahkan dan menghimbau untuk menikah.

Beliau bersabda:<sup>34</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)

“Abdullah Ibnu Mas’ud Radhiyallahu’anhun Berkata: Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda pada kami: wahai sekalian pemuda! Barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, hendaknya segera menikah karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, barang siapa yang belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”.

Nikah ditinjau dari hukum syar’inya ada lima macam, terkadang menjadi wajib, terkadang menjadi sunah, terkadang menjadi mubah, terkadang menjadi haram dan terkadang menjadi makruh.

1. Nikah menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus ke dalam perbuatan zina jika tidak segera menikah karena menikah adalah jalan untuk menyucikan diri dari hal-hal yang haram.<sup>35</sup>
2. Menikah disunahkan dengan adanya syahwat dan tidak ada rasa khawatir terjerumus ke dalam perzinahan karena pernikahan ini mengandung berbagai kemaslahatan yang agung bagi kaum laki-laki

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Loc.Cit.*

<sup>34</sup> Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Alih Bahasa Oleh Asyrafuni, (Jakarta: Darul Falah, 2013) h. 815.

<sup>35</sup> *Ibid.*,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan wanita. Juga bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.<sup>36</sup>

3. Nikah menjadi mubah, yaitu bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.<sup>37</sup>
4. Nikah menjadi haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupannya.
5. Nikah menjadi makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk kawin juga belum ada.<sup>38</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena itu dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Op., Cit*, h.79.

<sup>37</sup> H.M.A. Tihami dan Suharmi, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 11.

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Loc., Cit*.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*rahmah*, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai.<sup>39</sup>

Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku dalam setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dan unsur-unsur rukun.<sup>40</sup>

Yang menjadi rukun suatu pernikahan adalah:

Drs. H. Aliy As'ad dalam bukunya *fathul Mu'in* menulis

أَرْكَانُهُ أَيِ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ : زَوْجَةٌ، وَزَوْجٌ، وَوَلِيٌّ، وَشَا هِدَانٍ، وَصِغَةٌ.

“Rukun nikah ada lima, yaitu: calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi dan sighat”.<sup>41</sup>

#### a. Calon Suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat: Bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa atau kemauan sendiri, orang tertentu atau jelas orangnya atau tidak sedang dalam ihram<sup>42</sup> dan minimum berumur 19 tahun.

#### b. Calon Istri

Calon istri yang akan menikah harus tidak ada larangan syar'i, yaitu: tidak bersuami, bukan mahram dan tidak dalam masa iddah.

<sup>39</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1998), h. 69-70.

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 59.

<sup>41</sup> H. Aliy As'ad, *fathul Mu'in* 3, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), h. 13.

<sup>42</sup> Ustad sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah, (Hukum Perkawinan Islam)*, Alih Bahasa Oleh Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 67.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang istri juga harus jelas orangnya, tidak sedang dalam ihram haji<sup>43</sup> dan merdeka atas kemauan sendiri.

Al-Quran tidak menjelaskan secara langsung persyaratan persetujuan dan izin pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Namun dalam hadis Nabi banyak berbicara berkenaan dengan izin persetujuan tersebut di antaranya;

Hadis Nabi Abu Hurairah *muttafaq alaih* yang berbunyi:

لَا تَنْكِحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تَسْتَأْمَرَ وَلَا تَنْكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ أَذْنِهَا قَالَ إِنْ تَسَكَتَ

“Perempuan yang sudah janda tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia minta dikawinkan dan perempuan yang masih perawan tidak boleh dikawinkan kecuali setelah diminta izin. Mereka berkata ya Rasul Allah bagaimana bentuk izinnya Nabi berkata izinnya adalah diamnya”.

Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Muslim yang berbunyi;

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

“Seorang janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan walinya dan seorang gadis diminta izinnya, sedangkan izinnya itu adalah diamnya”.

Dari hadis di atas keharusan adanya izin dari perempuan yang dikawinkan bila ia telah janda dan izin itu harus secara terang, sedangkan terhadap perempuan yang masih perawan cukup hanya dengan diamnya.<sup>44</sup>

### c. Wali Nikah

Wali di dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Terdapat empat

<sup>43</sup> Ustad sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Op.Cit.*, h. 68.

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 65.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok wali yang memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan. Yaitu: *wali nasab*, *wali hakim*, *wali tahkim* dan *wali maula*.

*Wali nasab* adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan,<sup>45</sup> di dalam *wali nasab* ayah kandung, atau kakek dari ayah dan seterusnya ke atas memiliki hak *ijbar*<sup>46</sup> dalam kedudukan perwalian.

*Wali hakim* adalah seseorang yang ditunjuk dan diberi hak oleh pemerintah atau pihak yang diberi kuasa pada daerah tersebut untuk menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Di Indonesia dalam hal ini adalah pihak Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>47</sup>

Dalam pasal 23 kompilasi hukum Islam ditegaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin untuk menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan.<sup>48</sup>

*Wali tahkim* adalah wali yang dipilah oleh calon suami atau calon istri. Wali tahkim baru dapat menikahkan apabila wali nasab tidak ada, wali nasab gaib, tidak ada Qadi atau pegawai pencatat nikah.

*Wali Maula* adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikannya sendiri. Laki-laki yang boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya.

<sup>45</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrami, *Op.Cit.*, h. 95.

<sup>46</sup> *Wali mujbir* adalah laki-laki yang punya hak mutlak atau berkuasa untuk menikahkan anak atau cucu wanitanya yang masih gadis tanpa seizin sesuai dengan ketentuan syari'at. Lihat Buku karangan Nurhayati Zein dengan judul buku *Fiqh Munakahat* pada halaman 13.

<sup>47</sup> Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru : Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), h. 15.

<sup>48</sup> Ahamad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 87.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.<sup>49</sup>

#### d. Dua Orang Saksi

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah. Pasal 26 Undang-undang Perkawinan ayat (1) menegaskan: "Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami istri".<sup>50</sup>

#### e. Akad Nikah

Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut *ijab*. Sedangkan pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa rida dan setuju disebut *kaubul*. Kedua pernyataan antara *ijab* dan *kaubul* inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan.<sup>51</sup>

Syarat nikah dapat dibagi menjadi dua bagian, bagian yang pertama adalah syarat yang berkaitan dengan unsur rukun, sedangkan

<sup>49</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrami, *Op.Cit.*, h. 99.

<sup>50</sup> Ahamad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 95.

<sup>51</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrami, *Op.Cit.*, h. 79.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat yang kedua adalah syarat yang tidak berkaitan dengan rukun.

Adapun syarat nikah yang berkaitan dengan rukun adalah:

- a. Syarat bagi calon suami, yaitu, (1) tidak dipaksa atau terpaksa, (2) tidak dalam ihram haji atau umrah, (3) Islam, (4) Bukan mahram dari calon istri, (5) jelas orangnya, (6) dan minimum berumur 19 tahun.<sup>52</sup>
- b. Syarat bagi calon Istri adalah, (1) tidak dalam masa iddah, (2) tidak bersuami, (3) bukan mahram dari calon suami, (4) bukan perempuan musyrik, (5) jelas orangnya, (6) tidak sedang dalam ihram, (7) merdeka atas kemauan sendiri<sup>53</sup>
- c. Syarat bagi seorang wali, yaitu (1) laki-laki, (2) Islam, (3) balig, (4) berakal sehat, (5) tidak dipaksa, (6) adil.
- d. Syarat bagi saksi adalah (1) laki-laki, (2) beragama Islam, (3) balig, (4) berakal Sehat, (5) dapat berbicara dan melihat, (6) adil.<sup>54</sup>

Sedangkan syarat nikah yang tidak berkaitan pada unsur rukun adalah:

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukumnya wajib, yang merupakan

<sup>52</sup> Moh.Saifullah al-Aziz S., *Fiqh Islam Lengkap, Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Pemasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2005), h. 475. Untuk kemashalatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

<sup>53</sup> Maksud merdeka atas kemauan sendiri adalah sesuai dalam Pasal 16 KHI disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa daim dalam arti selama tidak ada penolakan tegas. Bila perkawinan tidak disetujui oleh seorang mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan. (pasal 17 (2) KHI)

<sup>54</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrami, *Op.Cit.*, h. 13.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu syarat sahnya nikah.<sup>55</sup> Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada yang lainnya atau siapa pun walaupun sangat dekat dengannya. orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa (4):4:<sup>56</sup>

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

### B. Prinsip Pernikahan yang Tertuang dalam Undang-undang Perkawinan

#### 1. Prinsip Sukarela

Sebagaimana yang tercantum di dalam Bab II pasal 6 ayat (1) bahwa: Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dengan maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, baik laki-laki maupun wanita keduanya punya hak untuk memilih pasangan hidup. Suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami istri, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Dan pasal tersebut menjamin tidak adanya kawin paksa.

#### 2. Prinsip Partisipasi Keluarga

Pernikahan tidak hanya hubungan antara dua individu tetapi juga mempertimbangkan hubungan keluarga kedua belah pihak, keterlibatan

<sup>55</sup> Ahamad Rofiq, *Op.Cit.*, h.101.

<sup>56</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrami, *Op.Cit.*, h. 37.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak keluarga sangat penting. Oleh karena pernikahan merupakan suatu peristiwa penting yang sangat erat berhubungan dengan orang lain khususnya keluarga, sangat mudah dimengerti jika sesuai dengan hukum Islam, Undang-undang Perkawinan tetap mempertahankan asas keterlibatan atau partisipasi aktif keluarga dalam pernikahan.<sup>57</sup> Penetapan keharusan ada wali dalam pelaksanaan suatu akad nikah, baik dalam konteks hukum Islam maupun Undang-undang Perkawinan, membuktikan arti penting dari prinsip partisipasi keluarga ini. Demikian pula dengan keharusan ada izin dari wali terutama bagi anak yang belum mencapai usia nikah, di samping keharusan ada saksi dalam setiap penyelenggaraan akad nikah.

### 3. Prinsip Mempersulit Perceraian

Pernikahan adalah peristiwa yang sangat penting, selain itu pernikahan juga memiliki nilai yang sakral. Sehingga persoalan pernikahan tidak boleh hanya dijadikan sebagai sarana hubungan seksual. Maksud dan tujuan asas ini adalah untuk mempersulit penjatuhan talak, talak tidak boleh dijatuhkan sesuka hati kaum laki-laki di atas penderitaan kaum perempuan, akan tetapi harus memiliki alasan-alasan kuat dan disampaikan di depan sidang pengadilan. Sehingga Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang melakukan perceraian.

### 4. Prinsip Monogami

Asas penting lain yang dianut sistem Undang-undang Perkawinan pada umumnya adalah asas monogami, yakni asas yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka

<sup>57</sup> Ririn Angreany, *Op.Cit.*, h. 24.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu tertentu. Selain itu Islam tidak mengenal istilah poliandri atau seorang wanita bersuamikan lebih dari satu. Hukum Islam termasuk hukum dalam bentuk perundang-undangnya memberi kemungkinan atau tepatnya membolehkan poligami bagi orang tertentu, dengan alasan tertentu, dalam keadaan tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>58</sup> Syarat-syarat yang dimaksud ialah bahwa poligami dilakukan harus atas sepengetahuan istri atau istri-istri yang telah ada, berkemampuan secara ekonomis dan memperoleh izin dari pengadilan yang berwenang.

#### 5. Prinsip Kedewasaan

Pernikahan sangatlah bermanfaat bagi kelangsungan hidup dan perkembangan manusia, tetapi tidak serta merta memberikan kebebasan tanpa ada batasan, salah satu pertimbangan untuk dikategorikan layak menikah adalah jika sudah dewasa, matang dari jasmani maupun rohaninya. Maksudnya, Undang-undang Perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis (rohani), sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Berkenaan dengan asas kematangan ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan batas umur yang akan melakukan pernikahan.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Prinsip Menjaga Dan Memelihara Derajat Kaum Wanita

Adanya kesamaan hak dan kewajiban antara suami dan Istri haruslah menjadi pertimbangan dalam pernikahan. Maksud dan tujuan dicantumkannya asas ini adalah untuk memperjelas sekaligus mempertegas hak-hak yang harus diperoleh kaum perempuan (istri/ibu) dibalik pencantuman kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kaum laki-laki (suami/ayah).

Berdasarkan analisa di atas, jalinan kerja sama dan keserasian hubungan antara laki-laki (suami/ayah) dengan perempuan (istri/ibu) dalam mewujudkan keluarga (rumah tangga) sakinah yang dicita-citakan setiap keluarga muslim.<sup>59</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT QS. An-Nisa (04): 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

<sup>59</sup> Ririn Angreany, *Op.Cit.*, h. 25-26.



## 7. Prinsip Legalitas

Asas legalitas pada intinya mengajarkan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat oleh petugas (pejabat) yang berwenang. Selain berfungsi sebagai tertib administrasi dan perlindungan hukum bagi warga Negara masing-masing, asas legalitas dalam perkawinan juga mempermudah para pihak terkait dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan Undang-undang Perkawinan di sebuah negara.

Lebih dari itu, asas legalitas dalam perkawinan seyogyanya tidak dipahami dalam konteks administratif saja, akan tetapi idealnya juga memiliki nilai hukum normatif yang bersifat mengikat dalam pengertian pencatatan perkawinan akan turut menentukan sah tidaknya sebuah akad nikah yang dilangsungkan sepasang laki-laki dan perempuan. Dengan penerapan asas legalitas yang lebih maksimal, kemungkinan praktik kawin di bawah tangan (kawin siri) di masyarakat dapat ditekan sedemikian rupa.<sup>60</sup>

## 8. Prinsip Selektivitas

Prinsip selektivitas dirumuskan dalam beberapa larangan perkawinan, dengan siapa seseorang boleh melakukan pernikahan, dan dengan siapa pula dia dilarang (tidak boleh) menikah.

Di antara sejumlah larangan pernikahan itu antara lain :

1. Larangan perkawinan karena hubungan nasab.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 27.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Larangan perkawinan dengan saudara tertentu yang memiliki hubungan darah terlalu dekat.
3. Larangan perkawinan karena hubungan susuan.
4. Larangan perkawinan karena hubungan semenda.
5. Larangan perkawinan terhadap wanita yang pernah *dili'an*.
6. Larangan perkawinan poliandri.
7. Larangan perkawinan dengan bekas istri yang telah ditalak *ba'in kuba*.
8. Larangan poligami yang melebihi empat orang.
9. Larangan perkawinan dengan pezina (laki-laki/perempuan).
10. Larangan perkawinan dengan orang musyrik (musyrikah).
11. Larangan perkawinan dengan orang yang beda agama.

#### C. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Pada hakikatnya perintah itu memiliki tujuan yang mulia dan penuh barakah. Allah SWT. mensyari'atkan untuk kemaslahatan hamba-Nya dan kemanfaatan bagi manusia, agar tercapai maksud-maksud yang baik dan tujuan-tujuan yang mulia itu.

Sesuai fitrahnya, manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks. Oleh karena itu, Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 28.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan jangka pendek dari sebuah perkawinan adalah menghindari zina. Seorang laki-laki secara natural akan bangkit hasrat seksualnya seiring dengan sampainya dia pada tahap balig dalam istilah fikih. Tanda balignya seorang laki-laki adalah saat dia mulai mimpi basah. Itu artinya, hasrat libido sudah mulai tumbuh. Karena pria adalah gender manusia yang memiliki sifat agresif dalam hal seks sedang di sisi lain Islam melarang perbuatan zina.<sup>62</sup> Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Isra' (17): 32,

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

Maka Rasulullah menganjurkan anak muda untuk segera menikah. Karena perkawinan akan memelihara mata dan menjaga kemaluan dari perbuatan zina.<sup>63</sup> Pada akhir hadits yang sama Nabi bersabda bahwa kalau tidak mampu menikah maka dianjurkan untuk berpuasa agar nafsu syahwatnya menurun. Puasa adalah salah satu cara menurunkan syahwat. Cara lain seperti olahraga dan mengurangi atau menghindari makanan-makanan tertentu dapat juga dipakai.

Jadi, tujuan awal dan mendesak dari perkawinan adalah menghindari zina. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat tidak mentolerir pergaulan bebas antar lawan jenis yang berujung pada perzinahan dan secara signifikan akan

<sup>62</sup> A. Fatih Syuhud, “Filosofi Perkawinan Dalam Islam”. <https://www.fatihsyuhud.net/filosofi-perkawinan-dalam-islam/> (diakses pada 28 Oktober 2019).

<sup>63</sup> Hadits sahih riwayat Bukhari dan Muslim (muttafaq aliah). Teks hadits: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنْكُمْ الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجُوا فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. Wahai pemuda, barang siapa yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena perkawinan itu dapat menutup mata (dari godaan) dan menjaga kemaluan (dari zina). Bagi yang tidak mampu menikah, maka hendaknya berpuasa karena itu adalah obat (penurun syahwat).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merusak tatanan kekeluargaan, kemasyarakatan dan cita-cita Islam untuk mendidik umat menjadi komunitas terbaik di dunia.

Sebagaimana firman Allah SWT QS. Ali Imron (03): 110,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”.

Tentu, perkawinan tidak hanya bertujuan sebagai pemenuhan hasrat libido semata. Ada beberapa tujuan jangka panjang berkaitan dengan perkawinan yang antara lain adalah, pertama, sebagai wujud ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya.

Islam telah mensyari’atkan perkawinan dan menjadikannya sebagai salah satu syiar agama.<sup>64</sup> Kedua, mengikuti sunah Nabi Muhammad dan para Rasul sebelumnya. Perkawinan merupakan salah satu teladan para Rasul seperti tersurat dalam QS. Ar-Ra’d (13): 38,

أَرْسَلْنَا أَرْسُلًا رُّسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).”

Al-Qurtubi dalam Tafsir Al-Qurtubi mengatakan bahwa maksud dari ayat di atas adalah anjuran untuk menikah dan menyegerakan menikah serta

<sup>64</sup> A. Fatih Syuhud, *Loc. Cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

larangan untuk tabattul (tidak menikah selamanya seperti yang dilakukan pendeta Katolik).

Ketiga, memperbanyak jumlah umat Islam. Dalam sebuah hadits riwayat Abu Dawud, Nabi bersabda, “Nikahilah perempuan yang subur karena aku suka melihat umat yang banyak kelak di hari kiamat.”

Keempat, agar memiliki anak cucu yang dapat berjihad memakmurkan bumi dan menyembah Allah. Untuk tujuan ini, maka Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab Syarh Sahih Bukhari menganjurkan setiap kali akan berhubungan intim dengan istri untuk berniat mendapatkan anak yang dapat berjihad. Pendapat ini disetujui oleh Al Mawardi dalam *Nasihatul Muluk*.<sup>65</sup> Jihad yang dimaksud tidak harus bermakna perang di jalan Allah, tapi juga jihad atau beramal di bidang ekonomi, keilmuan, dan lain-lain.

Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Anfal (08): 72,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلَا يَتَّبِعُهُم مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

<sup>65</sup> Al Mawardi dalam *Nasihatul Muluk*, h. 66.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelima, mencari keridhaan Allah. Pernikahan adalah ibadah yang keutamaan dan pahalanya sangat luas. Karena di dalam kehidupan rumah tangga yang baik akan banyak sekali amal kebaikan yang mendapatkan pahala dari Allah. Seperti pahala menjaga diri dan keluarga dari perbuatan dosa, pahala memperlakukan istri dengan baik, pahala mendidik anak, pahala bersabar dalam mencari rezeki untuk anak istri, dan lain-lain.

Keenam, mendapatkan ketenteraman hati. Dalam QS. Ar-Rum (30): 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Ketujuh, selamat dari fitnah dan praduga. Orang yang sudah menikah dianggap lebih memiliki kredibilitas dan integritas. Kata-katanya akan lebih didengar. Orang dewasa yang tidak menikah cenderung diasumsikan macam-macam karena dianggap menyalahi insting natural dan norma masyarakat.<sup>66</sup>

## D Pernikahan Dini dan Kehamilan di Usia Dini

### 1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini (Nikah di bawah Umur) sudah menjadi hal biasa di kalangan remaja masa kini. Dengan berbagai macam alasan ataupun sebab dilakukannya pernikahan dini. Pada dasarnya masalah pernikahan dini

<sup>66</sup> A. Fatih Syuhud, *Loc. Cit.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi topik yang sering diperbincangkan sejak dulu sampai sekarang, namun permasalahan ini tidak ada habisnya dan tidak memberikan solusi yang cerdas.

Tidak sedikit yang menilai bahwa pernikahan dini adalah solusi yang tepat untuk memelihara kehormatan remaja, karena dengan alasan bahwa pernikahan dini akan memberikan hubungan dan pergaulan yang sah antara dua pribadi, sehingga hal-hal yang dikhawatirkan bisa dihindari. Bagi pribadi, ini bisa dipahami mengingat pergaulan yang sangat bebas di kalangan remaja dan tidak mengenal batas.

Undang-undang maupun hukum Islam dalam hal ini fikih Islam memiliki perbedaan dalam menilai layakanya seseorang melakukan pernikahan. Masing-masing punya batasan dan tolak ukur dalam memberikan penilaian terhadap seseorang yang dikategorikan masih di bawah umur atau tidak. Pengertian pernikahan dini akan diuraikan dengan melihat perbandingan definisi antara Undang-undang dengan hukum Islam.<sup>67</sup>

#### a. Pernikahan Dini (Nikah di Bawah Umur) menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Pada dasarnya untuk melakukan pernikahan menurut Undang-undang lebih cenderung terhadap batas umur. Seperti dalam pasal 7 ayat 1 disebutkan :

<sup>67</sup> Ririn Angreany, *Op.Cit.*, h. 54-55.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Untuk menilai seseorang dalam kelayakan atau boleh tidaknya melakukan pernikahan bisa dilihat dari segi umurnya, pria diperbolehkan menikah jika sudah mencapai 19 tahun sedangkan wanita berumur 16 tahun. Maka pengertian dari pernikahan dini adalah seseorang yang melakukan pernikahan belum mencapai usia yang telah ditentukan Undang-undang.

Batasan umur yang termuat dalam Undang-undang Perkawinan sebenarnya masih belum terlalu tinggi dibanding dengan beberapa negara lainnya di dunia. Aljazair misalnya membatasi umur untuk melangsungkan pernikahan itu, laki-laknya 21 tahun dan yang perempuan 18 tahun.<sup>68</sup>

Demikian juga dengan Bangladesh 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan. Memang ada juga beberapa negara yang mematok umur tersebut sangat rendah. Yaman utara misalnya membatasi umur perkawinan tersebut pada umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Malaysia membatasi usia perkawinannya, laki-laki berumur 18 tahun dan yang perempuan 16 tahun. Dan rata-rata negara di dunia membatasi usia perkawinan itu laki-laki 18 tahun dan wanitanya berkisar 15 dan 16 tahun.<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Tahir Muhammad, "personal law in Islamic countries," dalam Amiur nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU no 1/1974 sampai KHI* (Cet.3; Jakarta: kencana, 2006), h. 69.

<sup>69</sup> Ibid.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dari itu pengaturan usia ini sejalan dengan prinsip pernikahan yang mengutamakan tentang kematangan jiwa maupun raganya. Sehingga bisa tercipta keluarga yang bahagia kekal tanpa adanya perceraian.

#### b. Pengertian Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam

Lima prinsip dalam hukum Islam yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu di antaranya adalah agama menjaga jalur keturunan. Sehingga Islam memberikan jalan yang legal dan sah terhadap pemeliharaan keturunan, melalui pernikahan. Karena dengan pernikahan akan menjaga terhadap kejelasan keturunan atau generasi.

Dalam Islam pernikahan itu di tandai dari segi kedewasaan atau balig. Meskipun belum mencapai umur 19 tahun bagi pria atau 16 tahun bagi wanita tetapi sudah memiliki tanda-tanda balig maka agama membolehkan seseorang melakukan pernikahan.

Kedewasaan (balig) seseorang bisa dilihat jika seseorang pria sudah pernah mimpi basah atau menstruasi bagi wanita. Hal ini senada dengan pendapat Sulaiman Rasjid, bahwa kategori balig meliputi: Cukup berumur lima belas tahun, keluar mani, mimpi bersetubuh dan mulai keluar haid bagi perempuan.<sup>70</sup>

Tetapi dalam Islam yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah seseorang yang melangsungkan pernikahan namun belum dewasa atau balig.

<sup>70</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2004), h. 65.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan dalam hukum Islam seperti yang diterapkan oleh ulama fikih adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan pernikahan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, yang demikian dipandang telah siap nikah secara biologis. Akan tetapi dalam perkembangan yang terjadi kemampuan secara biologis tidaklah cukup untuk melaksanakan pernikahan tanpa mempunyai kemampuan secara ekonomis dan psikis. Secara ekonomis berarti sudah mampu mencari atau memberi nafkah dan sudah mampu membayar mahar, sedangkan secara psikis adalah kedua belah pihak sudah matang jiwa raganya. Perkawinan hanya sah dilakukan oleh orang yang bisa melakukan transaksi yaitu balig, berakal dan pintar.<sup>71</sup>

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhai oleh Allah SWT. dan Rasul-Nya. Maka pernikahan tersebut akan terwujud jika di antara kedua belah pihak sudah memiliki kemampuan biologis, ekonomis dan psikis maka akan terciptanya hubungan saling tolong-menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling nasihat menasihati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing.<sup>72</sup>

## 2. Pengertian Kehamilan di Usia Dini

Masa remaja merupakan masa peralihan atau masa transisi atau masa pancaroba yang penuh gejolak yaitu masa kanak-kanak menuju masa

<sup>71</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 2* (Cet.2; Jakarta :Almahira, 2012), h. 457.

<sup>72</sup> Ririn Angreany, *Op.Cit.*, h. 57.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dewasa mandiri. Kehamilan bisa jadi dambaan tetapi mungkin juga di anggap malapetaka apabila kehamilan itu sendiri tidak di inginkan.<sup>73</sup>

Kehamilan remaja adalah kehamilan yang terjadi pada wanita usia antara 14 – 19 tahun baik melalui proses pranikah atau nikah. Menurut ciri-ciri perkembangannya, masa remaja di bagi menjadi tiga tahap yaitu masa remaja awal 10-12 tahun, masa remaja tengah 13-15 tahun, masa remaja akhir 16-19 tahun.<sup>74</sup>

Kehamilan usia dini memuat risiko yang tidak kalah berat. Pasalnya, emosional ibu belum stabil dan ibu mudah tegang. Sementara kecacatan kelahiran bisa muncul akibat ketegangan saat dalam kandungan, adanya rasa penolakan secara emosional ketika ibu mengandung bayinya.<sup>75</sup>

Wanita yang melahirkan anak pada usia yang lebih muda akan lebih tinggi kemungkinannya untuk mengalami keracunan (*toxemia*), anemia dan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh kelahiran. Di samping itu, anak-anak mereka juga akan lebih besar kemungkinannya akan mengalami kematian setelah dilahirkan (*neonatal*) atau sewaktu masih bayi.<sup>76</sup>

<sup>73</sup> Ragilia Dinasti Wardani, dkk. Makalah: “*Kehamilan Remaja Dibawah Usia 20 Tahun*” (Jakarta Pusat: STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia, 2014), h. 1.

<sup>74</sup> Elsa Cindrya, “*Pengetahuan Tentang Kehamilan Remaja Pada Orangtua Anak Usia Dini Di Desa Muara Burnai II Kabupaten Oki Sumatera Selatan*”. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. Vol. 1, No.1, Tr, PDF File, h. 67.

<sup>75</sup> Ragilia Dinasti Wardani, dkk. *Loc.Cit*.

<sup>76</sup> Wijayanti, “*Resiko Kehamilan Pada Usia Remaja*”. *Jurnal Profesi*. Vol. 10, September 2013-Februari 2014, PDF File, h. 45.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Penundaan Kehamilan

49

### 1. Pengertian Penundaan Kehamilan

Penundaan kehamilan berarti pasangan suami istri yang telah mempunyai perencanaan yang kongkret mengenai kapan anaknya diharapkan lahir agar setiap anaknya lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur dan merencanakan berapa anak yang dicita-citakan, yang disesuaikan dengan kemampuannya dan situasi kondisi masyarakat dan negaranya.<sup>77</sup>

Kontrasepsi sebagai bentuk upaya penundaan kehamilan merupakan salah satu esensi masalah Keluarga Berencana (KB) yang secara resmi dipakai oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Istilah KB ini mempunyai arti yang sama dengan istilah yang umum dipakai di dunia internasional. misalnya *family planning*. KB dapat bermakna *Tanzim al-Nasl'* (pengaturan keturunan/ kelahiran) maupun *Tahdid al-Nasl* (pembatasan kelahiran).<sup>78</sup>

Metode pelaksanaan pengaturan jarak kehamilan di berbagai negara termasuk Indonesia mencakup dua macam metode, yaitu:

#### a. *Planning Parenthood*

Pelaksanaan metode ini menitik beratkan tanggung jawab kedua orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tenteram, damai, sejahtera dan bahagia. Walaupun bukan dengan jalan

<sup>77</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), h. 54.

<sup>78</sup> Suhaedah, Skripsi: "Pengaturan Jarak Kehamilan Menurut Al-Qur'an" (Makassar: UIN Alauddin, 2013), h. 16.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membatasi jumlah anggota keluarga. Hal ini, lebih mendekati istilah bahasa Arab *Tandzim al-Nasl'* (mengatur keturunan).

#### b. *Birth Control*

Penerapan metode ini menekankan jumlah anak, atau menjarangkan kelahiran, sesuai dengan situasi dan kondisi suami-istri. Hal ini, lebih mirip dengan istilah bahasa Arab *Tahdid al-Nasl* (membatasi keturunan). Tetapi dalam praktiknya di negara Barat, cara ini juga membolehkan pengguguran kandungan (*abortus* dan *menstrual regulation*), pemandulan (*infertilitas*) dan pembujangan.<sup>79</sup>

Menurut Mahjudin, keluarga berencana dibagi menjadi dua pengertian, yaitu pengertian umum dan khusus. Pengertian umum ialah suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga bagi ibu maupun bayinya, dan bagi ayah serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan, tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut. Sedangkan pengertian khusus ialah keluarga berencana dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan, atau pencegahan pertemuan antara sel sperma dari laki-laki dan sel telur dari perempuan sekitar persetubuhan.<sup>80</sup>

Menurut UU Nomor. 10/1992 keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui

<sup>79</sup> Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), h. 54-55.

<sup>80</sup> Mahjudin, *Masailil Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), h. 66-67.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, sejahtera.<sup>81</sup>

Dari pengertian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa keluarga berencana adalah istilah yang resmi digunakan di Indonesia terhadap usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, dengan menerima dan mempraktikkan gagasan keluarga kecil yang potensial dan bahagia.<sup>82</sup>

## 2. Hukum Penundaan Kehamilan dalam Islam

Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada seruan luas untuk ber KB, atau mencegah kehamilan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada upaya dan usaha yang serius untuk menjadikan *al-'azl* sebagai amalan yang meluas dan tindakan yang populer di tengah-tengah masyarakat.

Sebagian sahabat Rasulullah SAW. yang melakukannya pun tidak lebih hanya pada kondisi darurat, dan ketika hal itu diperlukan oleh keadaan pribadi mereka. Oleh karena itu, Nabi Muḥammad SAW. tidak menyuruh dan tidak melarang *al-'azl*. pada masa kita sekarang ini, umat manusia banyak menciptakan alat dengan berbagai cara dan alat untuk menghentikan kehamilan.<sup>83</sup>

Program KB secara prinsipil dapat diterima oleh Islam, bahkan KB dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan

<sup>81</sup> Lampiran Surat Keputusan Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana: Kep-10/Men/Meneg.K/02/1998.

<sup>82</sup> Mahjuddin, *Op. cit.*, h. 67.

<sup>83</sup> Thariq at-Thawari, *KB Cara Islam* (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2007), h. 123.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melahirkan keturunan yang tangguh sangat sejalan dengan tujuan syari`at Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Selain itu, KB juga memiliki sejumlah manfaat yang dapat mencegah timbulnya kemudharatan. Bila dilihat dari fungsi dan manfaat KB yang dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan maka tidak diragukan lagi kebolehan KB dalam Islam.<sup>84</sup>

### 3. Metode Penundaan Kehamilan

Para ahli fikih memperbolehkan perencanaan keluarga (KB) bagi beberapa alasan, di antaranya : kesehatan, sosial dan ekonomi. Berbagai metode tradisional dan metode modern dalam mencegah kehamilan sama-sama diizinkan, selama metode tersebut tidak merugikan kesehatan dan tidak menyebabkan aborsi. Perencanaan keluarga harus merupakan keputusan individual keluarga tanpa tekanan dan paksaan.<sup>85</sup>

Negara-negara yang menerapkan kebijakan populasi hanya boleh menghimbau masyarakatnya (dengan kampanye maupun pendidikan agar program KB tersosialisasikan), namun tidak boleh memaksa, keputusan harus tetap berada di tangan masing-masing keluarga.<sup>86</sup>

Di bawah ini akan menjelaskan tentang berbagai metode pencegah kehamilan:

#### a. Metode Tradisional dalam Mencegah Kehamilan

1. Metode yang digunakan oleh Pasangan Suami Istri Secara Umum

<sup>84</sup> BKKBN, "KB tidak Bertentangan Dengan Ajaran Islam" <http://www.bkkbn.go.id/gemapria/info.detail.php?infid> (diakses pada 02 Oktober 2019).

<sup>85</sup> Mustafa Kamal, *Fiqh Islam* (Yogyakarta; Citra Karsa Mandiri, 2002), h. 293.

<sup>86</sup> Suhaedah, *Op. cit.*, h. 27.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode ini secara umum akrab dilakukan oleh pasangan suami istri, karena termasuk metode tradisional, mudah, dan murah serta memerlukan kerja sama antara kedua belah pihak. Metode tersebut adalah:

- a. Melakukan hubungan terputus (*al-"azl*).
  - b. Menahan keluar mani.
  - c. Pemisahan antara dua kali keluar mani.
2. Penggunaan *vaginal spermicide* tradisional untuk perempuan

Penggunaan ramuan atau obat yang berfungsi untuk meluruhkan sperma yang sudah masuk, bisa didapatkan dari saripati lemak nabati. Misalnya, minyak buah delima, foam atau busa khusus, minyak kol atau kubis, air perasan (*juice*), asam mentimun atau *suppositoria* yang dapat meleleh (umumnya berbahan dasar lilin yang lunak). Cara penggunaannya, umumnya dengan mengoleskan cairan *spermisid* ke dalam vagina (ke atas, setelah jari memasuki bibir vagina) hingga pada bagian mulut rahim.<sup>87</sup>

3. Cara atau alat khusus yang digunakan bagi laki-laki

Untuk mencegah kehamilan, kaum lelaki juga menggunakan metode khusus yaitu melumasi penis dengan bahan-bahan yang dapat membunuh sperma, sehingga tergelincir (efek peluruhan) keluar vagina, seperti minyak atau lemak nabati, juice bawang atau garam khusus yang mengandung zat pembunuh sperma.

<sup>87</sup> Suhaedah, *Op. cit.*, h. 29.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Obat-obatan tradisional yang dikonsumsi oleh wanita

Secara tradisional, kaum perempuan menggunakan tumbuh-tumbuhan alami, sebagai minuman untuk menghambat atau mencegah kehamilan. Di antaranya berupa campuran sari rempah dan madu, benih (biji), arum (sejenis tanaman keladi) yang dicampuri dengan air dan cuka, kayu manis, pohon damar, biji-bijian tertentu, air *bazarukh*, mengkonsumsi kacang buncis sebelum makan dan minum selama 40 hari, dan meminum air rendaman biji wijen.

<sup>88</sup>

#### 5. Teknik pembuangan cairan sperma rahim setelah bersetubuh

Teknik pembuangan cairan ini dikenal dengan teknik "*azl*" dan variasinya. Proses ini dilakukan ketika suami melakukan gerakan mundur dan mencabut kemaluan. Atau, sang istri mengambil posisi duduk di atas. Selain itu, bisa juga memakai minyak dan obat-obatan setelah berhubungan, menghirup aroma yang menyengat, dan mengalirkan zat asam yang dapat mematikan sperma ke dalam vagina.<sup>89</sup>

#### 6. Teknik sihir dan magis yang diwarisi dari peradaban masa lampau

Dalam banyak kasus, ditemukan teknik mengontrol kehamilan dengan sihir. Tentunya, hal ini melibatkan campur tangan jin dan haram hukumnya.<sup>90</sup>

<sup>88</sup> Thariq At-Thawari, *Op. cit.*, h. 91-93.

<sup>89</sup> Suhaedah, *Loc. Cit.*

<sup>90</sup> Thariq At-Thawari, *Loc. Cit.*

## b. Metode Modern dalam Mencegah Kehamilan

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan yang dicapai dan diketahui oleh umat manusia serta beralihnya sebagian ilmu Yunani dan bangsa kuno dahulu menuju dunia Islam, serta kecanggihan dan kemajuan yang dicapai oleh umat manusia, ternyata, banyak ditemukan perangkat, cara, dan alat-alat yang serupa dengan 'azl, yaitu dari segi penumpahan air sperma lelaki di luar rahim (perempuan), membunuh sel-sel sperma dan merusak sel telur perempuan dengan alat-alat kimia.

91

Ada 5 corak metode mengatur kehamilan:

1. Metode perintang, yang bekerja dengan cara menghalangi sperma dari pertemuan dengan sel telur (merintang pembuahan). Seperti: kondom, busa.
2. Metode hormonal, metode untuk mengendalikan atau menghindari kehamilan dengan obat-obatan atau suntikan yang mencegah indung telur mengeluarkan sel-sel telur, mempersulit pembuahan, dan menjaga agar dinding-dinding rahim tak menyokong terjadinya kehamilan yang tak dikehendaki. Seperti: pil KB, implan dan suntik.
3. Metode yang melibatkan alat-alat yang dimasukkan ke dalam rahim (IUD), gunanya untuk mencegah dan menghambat proses pembuahan sel telur oleh sperma ke dalam rahim. Seperti: metode Barrier.

---

<sup>91</sup> Ibid.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Metode alamiah, cara alami untuk mencegah kehamilan adalah dengan menggunakan teknik *Ogino-Knauss* yang membantu mengetahui kapan masa subur sehingga dapat menghindari hubungan seks pada masa itu. Seperti: metode kalender, metode termal (suhu badan basal), metode lendir serviks (*Billings*), *metode amenorea laktasi* (MAL), dan metode *Sympto-teral*.
5. Metode permanen, atau metode yang menjadikan tidak bisa lagi memiliki anak untuk selamanya, lewat suatu operasi. Seperti vasektomi dan tubektomi.<sup>92</sup>

Metode apapun yang digunakan untuk mencegah kehamilan boleh digunakan untuk mencegah kehamilan, asal disepakati oleh pasangan suami istri, dan tidak membahayakan tubuh dan nyawa mereka, serta tidak bertentangan dan bertolak belakang dengan Islam dan hukum-hukumnya.<sup>93</sup>

#### F Kaidah *Jalbu al-Mashalih wa Daf'u al-Mafasid*

*Jalbu al-Mashalih wa Daf'u al-Mafasid* adalah meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan). karena pada dasarnya manusia dalam sehari-hari tidak jauh dengan hal yang masalah dan mafsadat seperti yang dikatakan oleh Izzuddin bin Abdul as-Salam di dalam kitabnya *Qawaidul al-Ahkam fi mushalih al-Anam* mengatakan bahwa seluruh syari'ah itu adalah muslahat, baik dengan cara menolak mafsadat atau dengan meraih maslahat.

<sup>92</sup> Keluarga Berencana", <http://situs.kesrepro.info/kb/referensi.htm> (diakses pada 02 Oktober 2019).

<sup>93</sup> Thariq At-Thawari, *op.*, cit. h. 122.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerja manusia itu ada yang membawa kepada kemaslahatan, ada pula yang menyebabkan mafsadat.<sup>94</sup> Seluruh maslahat itu diperintahkan oleh syari'ah dan seluruh yang mafsadat dilarang.

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصده الشارع قيام مصالح في الدين والدنياما

“Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemashlahatan duniyah dan duniawiyah secara bersama-sama”.

اين ما وجدت المصلحة فثم شرع الله

“Kapan saja ditemukan kemashlahatan, maka itu syari'at Allah”

Izzuddin bin Abd al-Salam di dalam kitabnya qawaid al-Ahkam fi Musholih al-Anam mengatakan bahwa seluruh Syariah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih maslahah. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada mashlahat ada pula yang menyebabkan mafsadah. Baik maslahat maupun mafsadah ada yang untuk kepentingan duniawiyah dan ada yang untuk kepentingan ukhrowiyah, dan ada juga yang untuk kepentingan duniawiyah sekaligus ukhrowiyah. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syariat dan seluruh yang mafsadat dilarang oleh syariat. Setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkat-tingkatannya dalam keburukan dan kemudharatannya.<sup>95</sup>

Kemaslahatan dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1. Kemaslahatan dari wajibat, setiap hal yang wajib pasti membawa kemaslahatan. Contohnya shalat fardu.

<sup>94</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 27.

<sup>95</sup> A. Djazuli, *Op. cit.*, h. 2.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kemaslahatan dari mandubat (tindakan yang sunah). Contohnya Sholat Sunah.

Semua hal yang wajibat maupun yang mandubat adalah sesuatu yang membawa kemaslahatan, apabila kita melaksanakan perintah Allah, maka kita termasuk orang yang bertakwa. Adapun Allah memberikan jaminan kepada orang yang bertakwa, di antaranya:

QS. Ath-Thalaq (65): 2,

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”.

QS. Ath-Thalaq (65): 4,

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِّن نِّسَائِكُمُ إِن رَّتَبْنَهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.

QS. Ath-Thalaq (65): 5,

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا

“Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya”.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kemaslahatan dari mubahat (tindakan yang jawaz), yang dimaksud mubah di sini adalah bukan sesuatu yang jika dikerjakan ataupun ditinggalkan tidak akan mendapat pahala ataupun berdosa. Tapi, sesuatu yang jika sudah diperbuat maka akan menimbulkan dua kemungkinan yaitu akan jadi baik atau bahkan buruk.<sup>96</sup> Jika hal mubah yang kita perbuat sesuai dengan syariat Islam maka insyaallah akan mendapat pahala dan sebaliknya. Contohnya, Makan dan minum.

Kemafsadatan juga dibagi menjadi dua bagian:

1. Kemafsadatan dari makruhat (tindakan yang makruh), contohnya, memakan hal-hal yang menyebabkan bau tidak nyaman, berkumur ketika berpuasa.
2. Kemafsadatan dari muharromat (tindakan yang haram)<sup>97</sup>, contohnya adalah berzina.

Sebagian besar kemashlahatan dunia dan mafsadatnya telah diketahui akal pengetahuan. Melaksanakan kemashlahatan murni dan menolak kemafsadatan murni merupakan perbuatan yang sangat terpuji bagi manusia. Demikian pula, dalam mendahulukan kemashlahatan yang lebih unggul dan menolak kemafsadatan yang lebih unggul atau menolak kemafsadatan yang lebih unggul terlebih dahulu, kemudian mengerjakan kemashlahatan tingkat biasa atau mengerjakan kemashlahatan yang lebih unggul, kemudian menolak kemafsadatan tingkat biasa, perihal tersebut sudah ada consensus atas kebaikannya oleh ahli hukum.<sup>98</sup>

<sup>96</sup> Izzuddin Ibn Abd Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia*, terj. Ahmad Ibnu Izar, (Bandung: Musa Media, 2011), h. 7.

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> Fazdesign, "Kaidah Jalbu al Mashalih wa Daf'u al-Mafasid". <https://bocahhukum.blogspot.com/2018/06/kaidah-jalbu-al-mashalih-wa-dafu-al.html> (diakses pada 28 Oktober 2019).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam syariat terdapat perbedaan mana yang harus didahulukan antara menolak kemafsadatan atau mengerjakan kemadharatan, hal ini pada prinsipnya hanya berorientasi pada sulitnya mengetahui tingkat keunggulan masing-masing. Banyak manusia yang mengalami kebingungan, akhirnya mereka tidak mengerjakan kemashlahatn dan tidak memberantas kemafsadatan.<sup>99</sup>

Ulama ushul membagi mashlahah pada tiga bagian yaitu:

1. Jalbul Masholih, Apabila menghadapi maslahat pada waktu yang sama, dan harus dipilih salah satunya, maka pilihlah yang paling maslahat.

QS. Az-Zumar (39): 17-18,  
وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ  
الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو  
الْأَلْبَابِ

“Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal”.

QS. Al-A'raaf (7): 145,  
وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَا ح مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ  
قَوْمَكَ يَاخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ

“Dan telah Kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh (Taurat) segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu; maka (Kami berfirman): "Berpeganglah kepadanya dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada (perintah-perintahnya) dengan sebaik-baiknya, nanti Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik”.

<sup>99</sup> Izzuddin Ibn Abd Salam, *Op. cit.*, h. 3-4.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari kedua ayat di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika ada dua perkara yang baik, maka ambillah perkara yang paling baik di antara keduanya.<sup>100</sup>

Sebagai contoh, menghormati tamu adalah suatu yang maslahat, wiridan setelah sholat juga maslahat, lalu ketika kita sehabis sholat dan ada seorang tamu yang datang, maka temuilah tamu itu dan tinggalkanlah wiridan karena menghormati tamu adalah sesuatu yang membawa maslahat bagi kita pribadi juga bagi sang tamu sendiri. Sedangkan mashlahat dari wiridan adalah hanya untuk diri kita sendiri.

<sup>101</sup>

2. Mashlahah “dar’ul mafasid” (mashlahah dharuraat) Apabila menghadapi mafsadat pada waktu yang sama, maka cara memilih untuk meninggalkannya adalah dahulukan yang paling buruk akibatnya karena pada hakikatnya mengantisipasi hal-hal yang menimbulkan mafsadat berarti mengejar maslahat.

QS. Al-Baqarah (02): 11,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

“Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan".

Contohnya. Seorang ibu yang sedang hamil mengalami kontraksi yang sangat parah, sampai akhirnya dokter memberikan pilihan kepada keluarga tersebut untuk memilih salah satu jiwa yang harus dikorbankan. Dalam kasus ini maka yang harus dikorbankan

<sup>100</sup> Fazdesign, *Loc. Cit.*

<sup>101</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah sang anak. Karena ketika menyelamatkan seorang ibu kemungkinan sang ibu bisa hamil kembali. Tapi ketika yang diselamatkan sang anak, anak tersebut hanya akan dibesarkan oleh sang ayah seorang.<sup>102</sup>

Contoh lain juga terdapat pada QS. an-Nisa (04): 148,

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

“Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Perkataan yang buruk adalah suatu hal yang tidak baik, sedangkan dzalim ke pada orang lain juga termasuk perbuatan tercela. Allah SWT. tidak menyukai perkataan, dengan demikian perkataan yang buruk adalah hal yang mafsadat karena segala sesuatu yang makruh adalah mafsadat, tapi jika ada orang yang dzalim kepada kita maka kita diperbolehkan mengucapkan perkataan yang buruk itu karena untuk menangkai kerusakan yang lebih besar bisa dilakukan dengan kerusakan yang lebih kecil.<sup>103</sup>

#### 3. Dar’ul mafaasid muqaddamun ‘ala jalbil masholih

Apabila terkumpul antara maslahat dan mafsadat dan antara maslahat dan mafsadatnya sama-sama kuat, maka menolak mafsadat lebih utama dari pada meraih maslahat.

Contohnya, pada suasana panas, tidak berkumur dalam wudhu ketika berpuasa. Berkumur ketika berwudhu adalah suatu hal yang

<sup>102</sup> Izzuddin Ibn Abd Salam, *Loc. Cit.*

<sup>103</sup> Fazdesign, *Loc. Cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sunah, namun ketika melakukan kumur-kumur ketika berwudhu dikhawatirkan akan membatalkan puasa, maka lebih baik tinggalkanlah kumur-kumur tersebut.<sup>104</sup>

Tapi apabila mafsadatnya lebih besar maka yang harus dipilih adalah yang maslahatnya. Sebagai contoh QS. Al-Baqarah (02): 219,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa khamar memiliki mashlahat dan juga mafsadat. Tapi menurut ayat di atas, mafsadat dari khamar lebih banyak dari pada mashlahatnya. Maka dari itu tinggalkanlah khamar.<sup>105</sup>

<sup>104</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, Terj. Sukanan dan Khairudin, (Jakarta: Maktabah as-Sa’adiyyah Putra, t. th ), h. 46.

<sup>105</sup> Fazlurrahman, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang penundaan kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi pada perkawinan usia dini dalam tinjauan hukum, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Faktor utama yang menyebabkan penundaan kehamilan bagi pasangan suami istri usia dini di Kepenghuluhan Bangko Mukti, yaitu Faktor keinginan untuk tetap bersekolah dan faktor risiko yang berbahaya terhadap ibu dan anak jika hamil di usia dini dibanding menunda kehamilan di usia dini dan.
2. Di zaman kita sekarang ini sudah ada alat-alat kontrasepsi yang dapat dipastikan kemaslahatannya sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, yaitu melindungi anak yang masih menyusu dari bahaya termasuk *mafsadah*/dampak negatif yang lain dengan tidak menggauli istri selama menyusui, tetapi hal ini sangat memberatkan suami.

Atas dasar ini, untuk mewujudkan keluarga berkualitas, maka hukum menunda kehamilan pada perkawinan usia dini adalah mubah/diperbolehkan. Imam Ahmad dan lainnya menetapkan bahwa yang demikian itu diperbolehkan apabila istri mengizinkan. Karena dialah yang lebih berhak terhadap anak dan dia pula yang lebih berhak untuk bersenang-senang. Dan seperti yang diriwayatkan dari Umar ra, bahwa dia melarang *'azl* kecuali dengan izin istri.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama ini, maka penulis menyarankan kepada:

1. Bagi seorang wanita, agar sekiranya tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang nantinya akan menghancurkan hidup dan harus putus dari pendidikan, masa lalu akan menjadi suram tanpa adanya ilmu yang menuntun kepada kesuksesan, ada banyak dampak yang dialami baik segi fisik, mental maupun moral di mana hamil di luar nikah atau perzinaan sangat dipandang hina oleh masyarakat, dan di hadapan Allah SWT.
2. Bagi orang tua serta masyarakat Kepenghuluan Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir-Riau haruslah lebih memperhatikan anak-anaknya agar tidak mudah terjerumus dalam perzinaan sehingga pernikahan dini tidak harus dilakukan agar lebih fokus untuk melanjutkan pendidikan, beberapa kegiatan keagamaan perlu dikembangkan supaya para remaja bisa mengerti tentang apa yang halal dan yang diharamkan oleh Allah SWT.
3. Kalaupun harus melakukan pernikahan dini itu harus berdasarkan syarat syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta : Akamedia Pressindo.

Al-Ashfahani, Raghīb. t. Th. *al-Mufraadat fi Ghriibi al-Quran*. jilid I. Beirut: Maktabah Nazar Musthafa.

Al-Thawari, Thariq. 2007. *KB Secara Islam*. Solo: PT. Aqwam Media Proetik.

Al-Aziz S, Moh.Saifullah. 2005. *Fiqh Islam Lengkap, Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Pemasalahannya*, Surabaya : Terbit Terang Surabaya.

Al-Brigawi, Abdul Latif, *Fiqh Keluarga Muslim*, Rahasia Mengawetkan Rumah Tangga, Alih Bahasa Oleh Muhammad Misbah, Jakarta : Amzah 2012

Al-Fauzan, Saleh. 2005. *Fiqh Sehari-hari*, Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie al-Kattani Dkk, Jakarta : Gema Insani.

Al-Hamdani, Ustad sa'id bin Abdullah bin Thalib. 2002. *Risalah Nikah, (Hukum Perkawinan islam)*, Alih Bahasa Oleh Agus Salim, Jakarta : Pustaka Amani.

Almanhaj, *Kaidah ke 12 Harus Ada Saling Ridha Dalam Setiap Akad*. <https://almanhaj.or.id/2511-kaidah-ke-12-harus-ada-saling-ridha-dalam-setiap-akad.html> Diakses Pada 04 November 2019.

Angreany, Ririn. 2016. *Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar.

Ar-Rad, H. Aliy. 1979. *fathul Mu'in 3*, Yogyakarta : Menara Kudus.

Ar-Shabuni, M. Ali . 2008. *Perkawinan Islam*. Cet. 1. Solo: Mamtaza.

Asy-Syaukhani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Nailul al-Athar*. Beirut : Darl Fikr.

At-Thawari, Thariq. 2007. *KB Cara Islam*, Solo: PT. Aqwam Media Profetika.

Asyub, Syeik Hasan. 2006. *Fikih Keluarga*, alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar. Jakaarta Timur : Pustaka Al-Kautsar.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-iila' Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*, alih bahasa oleh, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta : Gema Insani.

\_\_\_\_\_. 2012. *Fiqih Imam Syafi'i 2* Cet.2; Jakarta : Almahira.

Bahasa, Pusat. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. IV. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Basuki. Tokoh Masyarakat di Dusun Maju Mukti Kepenghuluan Bangko Mukti, Wawancara, Dusun Maju Mukti Kepenghuluan Bangko Mukti, 04 September 2019.

BKKBN. 2008. *Pendewasaan Usia Kawin dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*. Jakarta: BKKBN.

\_\_\_\_\_. *KB tidak Bertentangan Dengan Ajaran Islam*, <http://www.bkkbn.go.id/gemapria/info.detail.php?infid> Diakses Pada 02 Oktober 2019.

Cindrya, Elsa. *Pengetahuan Tentang Kehamilan Remaja Pada Orangtua Anak Usia Dini Di Desa Muara Burnai II Kabupaten Oki Sumatera Selatan*. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. Vol. 1, No.1, Tt, PDF File.

Dasri. 2016. *Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Bagi Pengantin Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Qiyas. Vol. 1, No.1, PDF File.

Data\_elektronis\_sumber\_hukum\_RGS\_&\_Mitra Dihimpun dari cyber-space [internet] Indonesia diedit ulang oleh, Kantor Pengacara-Konsultan Hukum RGS & Mitra, "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". PDF File.

Dazuli, H.A. dan I. Nurol Aen. 2000. *Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.

\_\_\_\_\_. 2007. *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Isalam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana.

\_\_\_\_\_. 2010. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta : Kencana.

\_\_\_\_\_. 2011. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.

Fatih Syuhud, A. *Filosofi Perkawinan Dalam Islam*. <https://www.fatihsyuhud.net/filosofi-perkawinan-dalam-islam/> Diakses pada 28 Oktober 2019.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fazdesign, *Kaidah Jalbu al Mashalih wa Daf'u al-Mafasid*. <https://bocahhukum.blogspot.com/2018/06/kaidah-jalbu-al-mashalih-wa-dafu-al.html> Diakses pada 28 Oktober 2019.

Humaedillah, Memed. 2002. *Setatus Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta : Gema insani.

Hakim, Abdul Hamid. t. th. *Mabadi Awaliyah*, Terj. Sukanan dan Khairudin, Jakarta : Maktabah as-Sa'adiyyah Putra.

Pujiati, dan Hartono. Pasangan Suami Istri yang Melakukan Penundaan Kehamilan dengan Memakai Alat Kontrasepsi pada Perkawinan Usia Dini di Dusun Maju Mukti Kepenghuluan Bangko Mukti, *Wawancara*, Dusun Maju Mukti Kepenghuluan Bangko Mukti, 06 September 2019.

I-Software, Lidwa Pusaka. *Kitab 9 Imam Hadits*.

Karno, Tokoh Masyarakat sekaligus Penghulu di Kepenghuluan Bangko Mukti, *Wawancara*, Kepenghuluan Bangko Mukti, 03 September 2019.

Kamal, Abu Malik. 2007. *Fiqh Sunah Wanita*, Jakarta : Pena Pundi Aksara.

Kamal, Mustafa. 2002. *Fiqh Islam*, Yogyakarta ; Citra Karsa Mandiri.

Kesrepro. *Keluarga Berencana*. <http://situs.kesrepro.info/kb/referensi.htm> Diakses pada 02 Oktober 2019.

Khodijah, Indah. *Ushul Fiqih*. <http://indahkhodijah.blogspot.com/2012/02/ushul-fiqih-bab-i-pendahuluan.html> Diakses pada 06 Januari 2019.

Kodri, Melli Ros dan Azri Riyanti Petugas Kesehatan di Kepenghuluan Bangko Mukti, *Wawancara*, Kepenghuluan Bangko Mukti, 13 Juli 2018.

Lampiran Surat Keputusan Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana: Kep-10/Men/Meneg.K/02/1998.

Lena, dan Arif. Pasangan Suami Istri yang Melakukan Penundaan Kehamilan dengan Memakai Alat Kontrasepsi pada Perkawinan Usia Dini di Dusun Sido Dadi Kepenghuluan Bangko Mukti, *Wawancara*, Dusun Sido Dadi Kepenghuluan Bangko Mukti, 06 September 2019.

Lisnawati, dan Hardi. Pasangan Suami Istri yang Melakukan Penundaan Kehamilan dengan Memakai Alat Kontrasepsi pada Perkawinan Usia Dini di Dusun Maju Mukti Kepenghuluan Bangko Mukti, *Wawancara*, Dusun Maju Mukti Kepenghuluan Bangko Mukti, 06 September 2019.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Marjoko, Tokoh Masyarakat dan Ustadz di Dusun Maju Mukti Kepenghuluan Bangko Mukti, *Wawancara*, Dusun Maju Mukti Kepenghuluan Bangko Mukti, 04 September 2019.

Manjudin. 2007. *Masailil Fiqhiyah*, Jakarta : Kalam Mulia.

Mawardi, Al. *Nasihatul Muluk*.

Melli, Petugas Kesehatan di Kepenghuluan Bangko Mukti, *Wawancara*, Kepenghuluan Bangko Mukti, tanggal 06 September 2019.

Mahammad, Tahir. 2006. *Personal Law In Islamic Countries*, dalam Amiur nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan Hukum Islam dari Fiqih*, UU no 1/1974 sampai KHI Cet.3; Jakarta: kencana.

Muhayanti, dan Prasetya. Pasangan Suami Istri yang Melakukan Penundaan Kehamilan dengan Memakai Alat Kontrasepsi pada Perkawinan Usia Dini di Dusun Maju Mukti Kepenghuluan Bangko Mukti, *Wawancara*, Dusun Maju Mukti Kepenghuluan Bangko Mukti, 06 September 2019.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab, JA'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*. Alih Bahasa Oleh Masykur A.B, Afif Muhammad, dan Idrus al-Khaf, Jakarta: lentera, 2011

Nasional, Kompas. *Pernikahan Dini Memicu Masalah* <https://nasional.kompas.com> Diakses pada 06 Januari 2019.

Nuansa Aulia, Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : CV. Nuansa Aulia.

Nuruddin, Amiur dan Azhar Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih*, UU No 1/1974 sampai KHI Cet.3; Bandung: Prenada Media Group.

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga bagian kesatu Umum Pasal 18.

\_\_\_\_\_. Tentang Perkembangan Kependudukan, keluarga berencana, dan sistem Informasi Keluarga Bab I Ketentuan Umum.

Qadhwawi, Yusuf. 2010. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jilid 9. Terjemahan oleh Ahmad Semait. Jakarta: Pustaka Nasional.

Rahman, Abdur. 1992. *Perkawinan dalam Syariat Islam*, alih bahasa oleh Basri Iba Asghary dan Wadi masturi, Jakarta: Rineka Cipta.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasiwan, Warga Masyarakat di Kepenghuluan Bangko Mukti, *Wawancara*, Kepenghuluan Bangko Mukti, 03 September 2019.

Rasjid, Sulaiman. 2004. *Fiqih Islam (Hukum fiqih Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algasindo.

\_\_\_\_\_. 2006. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Ranawati, dan Mulyadi. Pasangan Suami Istri yang Melakukan Penundaan Kehamilan dengan Memakai Alat Kontrasepsi pada Perkawinan Usia Dini di Dusun Maju Mukti Kepenghuluan Bangko Mukti, *Wawancara*, Dusun Maju Mukti Kepenghuluan Bangko Mukti, 06 September 2019.

Rini, dan Danu. Pasangan Suami Istri yang Melakukan Penundaan Kehamilan dengan Memakai Alat Kontrasepsi pada Perkawinan Usia Dini di Dusun Sido Dadi Kepenghuluan Bangko Mukti, *Wawancara*, Dusun Sido Dadi Kepenghuluan Bangko Mukti, 06 September 2019.

Riyanti, Azri. Petugas Kesehatan di Kepenghuluan Bangko Mukti, *Wawancara*, Kepenghuluan Bangko Mukti, tanggal 06 September 2019.

Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Perss.

Salam, Izzuddin Ibn Abd. 2011. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia*, terj. Ahmad Ibnu Izar, Bandung: Musa Media.

Salamun. Tokoh Masyarakat sekaligus Sekretaris di Kepenghuluan Bangko Mukti, *Wawancara*, Kelurahan Bangko Mukti, 11 juli 2018.

\_\_\_\_\_, Tokoh Masyarakat sekaligus Sekretaris di Kepenghuluan Bangko Mukti, *Wawancara*, Kepenghuluan Bangko Mukti, 03 September 2019.

Sarwono, Prawirihardjo. 2005. *Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan KB*. Jakarta : Yayasan Bina Pusataka.

Somantri, Muhamad Dani. (2018, Desember). Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas: Analisa, Hukum, Perkawinan, Istihsan, dan Keluarga. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 3, No.2 E-ISSN: 2502-6593, PDF File.

Sudarto. 2018. *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, Yogyakarta: Budi Utama.

Syaedah. 2013. Skripsi: *Pengaturan Jarak Kehamilan Menurut Al-Qur'an*, Makassar : UIN Alauddin.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surapaty, Surya Chandra (at. all). 2016. *Buku Kebijakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga dalam Mendukung Keluarga Sehat*. Jakarta : BKKBN.

Suratun (at all). 2008. *Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi*, Jakarta: Trans Info Media.

Susenas, BPS. 2015. *Profil Anak Indonesia 2015*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) PDF File.

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta Timur : Prenada Media.

\_\_\_\_\_. 2012. *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana.

\_\_\_\_\_. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta : Prenada Media Group.

\_\_\_\_\_. 2014. *Ushul Fiqh 2*, Jakarta : Kencana.

Tihami, H.M.A. dan Suharmi. 2014. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press.

Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Lihat juga Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 8.

\_\_\_\_\_. Tetang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bab Ketentuan Umum Pasal 1 point 9.

\_\_\_\_\_. Tetang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bab Ketentuan Umum Pasal 20.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 2009. *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, alih bahasa oleh Abdul Ghoffar, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

Wardani, Ragilia Dinasti, dkk. 2014. Makalah: “*Kehamilan Remaja Dibawah Usia 20 Tahun*” Jakarta Pusat : STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Warson Munawir, Ahmad. 2002. *Kamus Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Cet.2. Surabaya: Pustaka Progresif.

Widayanti. 2014. *Resiko Kehamilan Pada Usia Remaja*”. *Jurnal Profesi*. Vol. 10, PDF File.

Wikipedia, *Pengaturan Kelahiran*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengaturan\\_kelahiran#Efek](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengaturan_kelahiran#Efek) Diakses Pada 04 November 2019.

Wirdhana, Indra. 2013. *Delapan Fungsi Keluarga*. Jakarta : Direktorat Bina Ketahanan Remaja.

Zain, Nurhayati. 2015. *Fiqh Munakahat*, Pekanbaru : Mutiara Pesisir Sumatra.

Zuhdi, Masjfuk. 1997. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : Toko Gunung Agung.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**


Skripsi dengan judul, *PENUNDAAN KEHAMILAN DENGAN MEMAKAI ALAT KONTRASEPSI PADA PERKAWINAN USIA DINI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM*, yang ditulis oleh:

Nama : **AMIN WIJAYANTO**  
 NIM : 11421103773  
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)  
 Telah dimunaqasyahkan pada :  
 Hari / Tanggal : Senin 30 Desember 2019  
 Waktu : 13:30 Wib  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Lantai 3 Gedung Dekanat  
 Fakultas Syariah dan Hukum

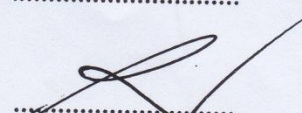
Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Januari 2020 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

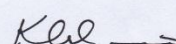
Ketua  
**Rahman Alwi, S.Ag, MA**

  
 .....

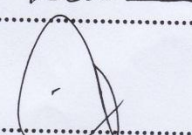
Sekretaris  
**Peri Pirmansyah, SH, MH**

  
 .....

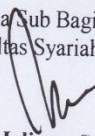
Penguji I  
**Hairul Amri, M.Ag**

  
 .....

Penguji II  
**Dr. H. Suhayib, MA**

  
 .....

Kepala Sub Bagian Akademik  
 Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Jalinus, S.Ag**  
 NIP. 19750801 200701 1 023





# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

### PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul PENUNDAAN KEHAMILAN DENGAN MEMAKAI ALAT KONTRASEPSI PADA PERKAWINAN USIA DINI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kelurahan Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir), ditulis oleh saudara :

Nama : Amin Wijayanto  
NIM : 11421103773  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Diseminarkan pada :  
Hari / Tanggal : Jum'at / 12-Juli-2019  
Narasumber : Dra. Asmiwati, M.A

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Bagian TU  
Fakultas Syariah dan Hukum

Pekanbaru,  
Narasumber

Erni, S.Sos., MM  
NIP. 19680226 199103 2 002

Dra. Asmiwati, M.A  
NIP. 19611231 199402 2 001



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كافة الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

## SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/6614/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini  
menerangkan bahwa :

Nama : AMIN WIJAYANTO  
N I M : 11421103773  
Jurusan : HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)

Telah Lulus :

## UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 31 JULI 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 16 Agustus 2019





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR KECAMATAN BANGKO PUSAKO KEPENGHULUAN BANGKO MUKTI

Jalan, H, Annas Ma'amun No. .... Telp. .... Kodepos: 28955

### SURAT KETERANGAN

Nomor: 387/ SK-PL/ 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Penghulu Bangko Mukti Kec. Bangko Pusako, Menerangkan bahwa:


Nama : AMIN WIJAYANTO  
NIM : 11421103773  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Jenjang : S1  
Judul Penelitian : PENUNDAAN KEHAMILAN DENGAN MEMAKAI ALAT KONTRASEPSI PADA PERKAWINAN USIA DINI DALAM TINJAUAN HUKUM (Studi Kasus di Desa Bangko Mukti Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir)  
Lokasi penelitian : Desa bangko Mukti, Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir

Menerangkan bahwan nama tersebut di atas berdasarkan surat rekomendasi dari : Kecamatan Bangko Pusako Nomor. 400/284/PKM adalah benar telah melakukan penelitian di Desa bangko Mukti.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangko Mukti, 20 November 2019

Penghulu Bangko Mukti

  
KARNI

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth;

1. Camat Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir
2. Yang bersangkutan





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
KECAMATAN BANGKO PUSAKO**

Jln. H. Annas Maamun No. .... email; [Bangkopusako411@gmail.com](mailto:Bangkopusako411@gmail.com) Kode Pos 28955

**BANGKO KANAN**

Bangko Kanan, 04 September 2019

No : 400/2019/PKM  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,  
Bapak/Dekan Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN SUSKA Riau di  
Pekanbaru  
di-

Tempat

Berdasarkan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Nomor : 070/Kesbangpol/2019/172 Perihal Rekomendasi Pra Riset.

Sehubungan dengan hal tersebut Camat Bangko Pusako  
Kabupaten Rokan Hilir memberi izin Penelitian dengan judul "**PENUNDAAN KEHAMILAN DENGAN MEMAKAI ALAT KONTRASEPSI  
PADA PERKAWINAN USIA DINI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI DESA BANGKO MUKTI KECAMATAN BANGKO  
PUSAKO KABUPATEN ROKAN HILIR**" Kepada :

Nama : **AMIN WIJAYANTO**  
Nim : 11421103773  
Program Studi : HUKUM KELUARGA (AKHWAL  
SYAKSIAH)  
Fakultas : S 1  
Alamat : PEKANBARU  
Lokasi Penelitian : KEPENGHULUAN BANGKO MUKTI  
KECAMATAN BANGKO PUSAKO  
KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai /tidak ada kaitannya dengan penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 6 Bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat sehingga selesai

Demikian disampaikan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

**An. CAMAT BANGKO PUSAKO**  
**Sekretaris Kecamatan**  
  
**H. SUKIRMAN, S.Ag**  
Perata TK I  
NIP.19710603 200501 1 003





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H



# BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113  
BAGANSIAPAPI

Bagansiapiapi, 02 September 2019

Nomor : 070/Kesbangpol/2019/142  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Hal : Rekomendasi Riset

Kepada :  
Yth Penghulu Desa Bangko Mukti  
Kecamatan Bangko Pusako  
Kabupaten Rokan Hilir  
di-  
Tempat :

Membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/25270 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi dengan ini memberikan Rekomendasi Riset kepada

1. Nama : AMIN WIJAYANTO
2. NIM : 11421103773
3. Program Studi : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul : PENUNDAAN KEHAMILAN DENGAN MEMAKAI ALAT KONTRASEPSI PADA PERKAWINAN USIA DINI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA BANGKO MUKTI KECAMATAN BANGKO PUSAKO KABUPATEN ROKAN HILIR)
7. Lokasi : DESA BANGKO MUKTI KECAMATAN BANGKO PUSAKO KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai
3. Salinan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Rokan Hilir

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional



DODI SUPRENDRA, S. Sos  
NIP. 19720902 199201 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR KECAMATAN BANGKO PUSAKO KEPENGHULUAN BANGKO MUKTI

Jalan, H. Annas Ma'amun No. .... Telp. .... Kodepos: 28955

### REKOMENDASI

Nomor: 300/ PEM-BM/REKOM/215

Penghulu Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako, setelah membaca Surat Rekomendasi dari : Camat Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Nomor. 400/284/PKM tanggal 04 September 2019 dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : AMIN WIJAYANTO  
 NIM : 11421103773  
 Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah  
 Jenjang : S1  
 Judul Penelitian : PENUNDAAN KEHAMILAN DENGAN MEMAKAI ALAT KONTRASEPSI PADA PERKAWINAN USIA DINI DALAM TINJAUAN HUKUM (Studi Kasus di Desa Bangko Mukti Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir)  
 Lokasi penelitian : Desa Bangko Mukti, Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir

Untuk melakukan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan dan Pengumpulan Data ini Berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terimakasih.

Bangko Mukti, 04 September 2019



### Tembusan: Disampaikan Kepada Yth;

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Camat Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir
3. Yang bersangkutan





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/25270  
TENTANG



032010

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6594/2019 Tanggal 15 Agustus 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : AMIN WIJAYANTO  |
| 2. NIM / KTP         | : 11421103773   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)   |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : PENUNDAAN KEHAMILAN DENGAN MEMAKAI ALAT KONTRASEPSI PADA PERKAWINAN USIA DINI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA BANGKO MUKTI KECAMATAN BANGKO PUSAKO KABUPATEN ROKAN HILIR) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA BANGKO MUKTI KECAMATAN BANGKO PUSAKO KABUPATEN ROKAN HILIR   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 16 Agustus 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

#### Tembusan :

#### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
- ☑ Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP



**Amin Wijayanto**, lahir di Desa Karyamukti Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 05 Desember 1993. Anak kedua dari dua bersaudara, dari bapak Katijo dan ibu ST Juwariyah. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 003 Karyamukti, lulus pada tahun 2006, setelah lulus sekolah dasar penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Bangko Pusako lulus pada tahun 2009, dan dilanjutkan di SMAN 2 Bangko Pusako dan lulus pada tahun 2012.

Kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan studi pada Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau).

*Alhamdulillah*, pada tanggal 30 Desember 2019 penulis mengikuti ujian munaqasyah, dengan judul skripsi, *"Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Pada Perkawinan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam"*, berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau penulis dinyatakan "LULUS" dengan predikat "SANGAT MEMUASKAN" dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

UIN SUSKA RIAU